



Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat

# Penguatan dan Pelemahan Persatuan Bangsa:

950-959)

lia dan Tokoh di Kalimantan Selatan (1923–1959)

Juniar Purba | Dana Listiana | Yusri Darmadi

# **Penguatan dan Pelemahan Persatuan Bangsa:**

**Media dan Tokoh di Kalimantan Selatan (1923–1959)**



---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**



---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

**Penguatan dan Pelemahan  
Persatuan Bangsa:  
Media dan Tokoh di Kalimantan Selatan (1923–1959)**



Juniar Purba

Dana Listiana

Yusri Darmadi

---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

**mja**  
Media Jaya Abadi

**Penguatan dan Pelemahan Persatuan Bangsa:  
Media dan Tokoh di Kalimantan Selatan (1923–1959)**



**Penulis:**

Juniar Purba  
Dana Listiana  
Yusri Darmadi

**Editor:**

Asep Ruhimat & Izzudin Irsam Mujib

ISBN: 978-623-7526-15-5

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Yuda A. Setiadi

**Penerbit:**

CV Media Jaya Abadi

**Redaksi:**

Padalarang-Bandung

Telp. +62 812 22205182

E-mail: [penerbit.mja.bandung@gmail.com](mailto:penerbit.mja.bandung@gmail.com)

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

***Isi di luar tanggung jawab penerbit***

# Daftar Isi

---

PRAKATA.....	vii
PENGANTAR.....	1
PEMIKIRAN PANGERAN MOHAMAD NOOR DALAM PERSATUAN DAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN SELATAN (1923–1959) Juniar Purba.....	5
SATU DAYAK DAN MENJADI INDONESIA-DAYAK: IMPIAN PERSATUAN BANGSA DALAM SOEARA PAKAT TERBITAN BANJARMASIN PADA TAHUN 1940-AN Dana Listiana.....	27
IBNU HADJAR: PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN DALAM MENEGAKKAN KEADILAN Yusri Darmadi.....	65
PENUTUP.....	81
TENTANG PENULIS.....	85

---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**



---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

# Prakata

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, atas berkah dan rahmat-Nya, penulisan sejarah yang berjudul *Penguatan dan Pelemahan Persatuan Bangsa: Media dan Tokoh di Kalimantan Selatan (1923–1959)* dapat terselesaikan dengan baik, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penulisan ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kalimantan Barat tahun anggaran 2019.

Kegiatan penulisan ini dilakukan untuk menghimpun dan mendokumentasikan pemikiran tokoh tentang kesatuan bangsa di Kalimantan Selatan. Dengan adanya penulisan ini, dapat diketahui tentang pemikiran Ir. Pangeran Mohamad Noor, salah seorang pemuda pertama dari Kalimantan Selatan yang saat itu berhasil menjadi seorang insinyur teknik dari ITB Bandung. Pemikiran beliau sungguh berharga dalam memajukan bangsa dan bidang pembangunan. Selain itu, dalam isi buku diungkapkan juga tentang dinamika gagasan yang dipublikasikan dari para intelektual muda yang hidup di tanah rantau pada masa pergerakan nasional dan juga perjalanan hidup Ibnu Hadjar yang memiliki rasa cinta tanah air dan meskipun beliau mengakomodasikan kekecewaan para pejuang dalam wadah Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT). Melalui pengungkapan ini diharapkan para generasi muda mengetahui tentang sejarah terutama pemikiran pada masa pergerakan nasional dan memiliki wawasan sejarah tentang Kalimantan Selatan.

Penulisan buku *Penguatan dan Pelemahan Persatuan Bangsa: Media dan Tokoh di Kalimantan Selatan (1923–1959)* dapat terwujud dengan adanya kerja sama dan arahan yang baik dari Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya, para narasumber yang ada di Kalimantan Selatan, para informan, serta rekan-rekan peneliti BPNB. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan ini, kami ucapkan terima kasih.



Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini. *Tiada gading yang tak retak*. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik sangat bermanfaat untuk kesempurnaan tulisan ini. Harapan kami, semoga hasil tulisan ini dapat menambah khazanah kesejarahan dan membawa manfaat bagi kita.

Pontianak, November 2019

Tim Penulis



---

## **Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat**

# Pengantar

---

Kalimantan memiliki sejarah yang panjang, terlebih pada masa-masa Proklamasi Kemerdekaan. Meskipun pada saat itu tentara Jepang telah menyerah kepada Sekutu, pejabat-pejabat Jepang masih merahasiakan tentang berita tersebut dan berharap bahwa bangsa Indonesia tidak mengetahuinya. Mereka berpikir bahwa rakyat Indonesia akan menganggap kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang.

Menguasai Kalimantan berarti berhasil dalam melengkapi kebutuhan logistik yang akan diperlukan karena kekayaan Kalimantan tidak terhingga dan banyak bahan-bahan mentah yang dimilikinya, seperti minyak, karet, batu bara, mangan, besi, emas, dan intan. Bagi penjajah, Kalimantan adalah pulau harapan. Namun, keinginan dan munculnya kesadaran ingin lepas dari penjajah terwujud dari pemikiran para pejuang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan ini merupakan cita-cita dari seluruh bangsa Indonesia.

Buku ini berisi tiga tulisan dari tiga peneliti yang isinya dibatasi secara temporal dan spasial. Batasan temporal dimulai sejak tahun 1923 saat Mohamad Noor kuliah dan ikut dalam kegiatan organisasi pejuang kemerdekaan. Kemudian, pada tahun 1940-an saat impian persatuan dan dinamika gagasan yang dipublikasikan dari ide para intelektual muda yang ada di rantau dan *Soeara Pakat* terbitan Banjarmasin. Selanjutnya, tentang Ibnu Hadjar sosok yang keras dan pemberani yang mengakomodasi kekecewaan para pejuang dalam wadah Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT) dan tahun 1959 merupakan tahun pembentukan daerah otonom Kalimantan Tengah dan peran dari Pangeran Mohamad Noor sebagai Menteri Pekerjaan Umum yang ikut serta mendampingi Ir. Soekarno dalam pemancangan tiang pembangunan ibu kota Kalimantan Tengah.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, impian untuk maju sudah tergambar pada diri para pemuda Kalimantan. Salah seorang di antaranya Mohamad Noor yang kemudian dikenal sebagai Ir. Pangeran Mohamad Noor. Ia merupakan salah seorang cucu dari Raja Banjar Sultan Adam al-Watsiq Billah. Dalam usianya yang baru 22 tahun, ia sudah memikirkan untuk melanjutkan kuliah ke *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (THS) pada tahun 1923. Pada masa studi empat tahun, ia berhasil menyelesaikan kuliah dan meraih gelar insinyur teknik pada tahun 1927 di Bandung.

Semenjak usia kanak-kanak, Mohamad Noor sudah banyak belajar dari alam dan sekelilingnya. Apalagi, saat itu ia banyak belajar dari ayahnya Pangeran Muhammad Ali yang bekerja di pemerintahan Kolonial Belanda. Kegemarannya membaca membuat dirinya mengetahui seluk beluk keadaan bangsa dan tanah airnya. Terlebih semenjak Mohamad Noor tinggal di Bandung dan selalu mengikuti diskusi atau pembicaraan tentang Indonesia merdeka bersama temannya Bung Karno dan Bung Hatta. Ia bahkan diangkat Gubernur Borneo<sup>1</sup> dan dijuluki sebagai Gubernur Perjuangan. Ia berjuang untuk kemerdekaan dan mempersatukan pasukan pejuang kemerdekaan di Kalimantan yang tergabung dalam Divisi IV ALRI. Beliau juga sebagai teknokrat yang memberikan inspirasi dalam membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat luas di Kalimantan. Kedudukannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum sangat berpengaruh dalam kemajuan pembangunan proyek Waduk Riam Kanan dan Proyek Pasang Surut di Kalimantan dan Sumatra.

Pada tahun 1940-an, di Kalimantan Selatan tumbuh suatu gerakan pemuda Dayak. Gagasan dari para intelektual muda ini dikemukakan dalam bentuk publikasi atau propaganda dan menyoroti persatuan dan etnik Dayak. Diskusi tentang arah pergerakan Pakat Dayak yang berfokus pada pergerakan di dalam kelompok dan membuka diri terhadap aktivitas-aktivitas pergerakan kebangsaan yang lebih luas ini menunjukkan keragaman pemikiran dalam organisasi. Hal ini dimuat pada *Soeara Pakat* edisi tahun 1940-an.

Seiring dengan masa pergerakan, nama Ibnu Hadjar, salah seorang pejuang kelahiran Desa Ambutun, Kandangan, Kecamatan

1 Sebutan untuk Pulau Kalimantan sebelum dimekarkan menjadi beberapa provinsi dan gubernurnya saat itu berkedudukan di Yogyakarta.

Hulu Sungai Selatan mengakomodasi para mantan prajurit yang merasa dikhianati oleh penguasa melalui organisasi gerilya Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT). Sebelumnya, beliau sebagai orang biasa yang memiliki rasa cinta tanah air, rela berkorban nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan melalui wadah perjuangan yaitu ALRI Divisi IV. Perjuangan tersebut merupakan dedikasi dirinya untuk mengintegrasikan Kalimantan Selatan dan bagian tenggara Kalimantan menjadi bagian dari NKRI. Beliau disidang dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 23 Maret 1965 oleh Mahkamah Militer di Jakarta.

Adapun maksud penguatan yang diungkap dari tulisan ini menggambarkan sikap dan perilaku dari tokoh M. Noor dalam pemikiran dan kegiatan perjuangannya yang ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Penguatan dalam *Soeara Pakat* edisi tahun 1940-an, menggambarkan pemikiran dari para tokoh intelektual pemuda Dayak yang gagasan pemikirannya dituangkan dalam publikasi dan propaganda tentang persatuan. Sementara itu, secara umum dikatakan pelemahan karena tindakan Ibnu Hadjar yang awalnya mendukung persatuan, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan sikap dengan memimpin aksi sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan pemerintah.

Penulisan ini menggunakan metode dan metodologi sejarah. Metode dan metodologi, dua hal yang diperlukan dalam penulisan kesejarahan. Metode adalah cara atau jalan yang merupakan prosedur untuk dapat mengetahui (*how to know*). Adapun metodologi adalah ilmu tentang metode mengetahui bagaimana cara mengetahui (*know how to know*). (Heliuss, 2012: 15). Dalam penelitian ini, digunakan metode sejarah yang terdiri dari empat langkah/kegiatan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Daliman, 2015: 26).

Semoga isi buku ini bermanfaat dan menjadi salah satu bacaan tentang sejarah, khususnya sejarah tentang Kalimantan Selatan.

Koordinator

Juniar Purba



---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

# Pemikiran Pangeran Mohamad Noor dalam Persatuan dan Pembangunan di Kalimantan Selatan (1923–1959)

Juniar Purba



Balai Pe

Budaya

Kalimantan Barat

Gambar 1. Ir. P.M. Noor  
Sumber: Sampul Buku Ir. P.M. Noor

**B**erbagai cara dilakukan untuk menghimpun informasi, sekaligus sebagai upaya dalam perjuangan Indonesia. Di Kalimantan Selatan, misalnya, informasi yang diperoleh dari surat kabar Borneo Shimboen mampu membakar semangat juang. Hal ini dibuktikan dengan keberangkatan pejuang bernama A.A. Hamidhan ke Jakarta untuk ikut bergabung sebagai utusan Kalimantan dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta. Para tokoh pemuda dan pejuang baik yang ada di Kalimantan maupun di luar pun ternyata tidak tinggal diam.

Pada saat proklamasi diucapkan, PPKI telah sepakat bahwa wilayah Republik Indonesia meliputi bekas wilayah kolonial Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II. Pada 19 Agustus 1945 ditetapkan secara administratif pembagian atas delapan provinsi dengan gubernurnya masing-masing, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Celebes, Sunda Kecil, Maluku, dan Kalimantan dengan gubernurnya yang dilantik Ir. Pangeran Mohamad Noor (Helius, 2015: 12).

Kepercayaan yang diberikan kepada Pangeran Mohamad Noor selaku Gubernur Kalimantan memberikan tanggung jawab yang besar sehingga ia berangkat ke Banjarmasin untuk bekerja sama dengan Badan Pembantoe Oesaha Gubernoer (BPOG) Republik Indonesia Daerah Borneo. Setelah pertemuan ini, beberapa gagasan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan rekan-rekannya, seperti Hasan Basri, George Obus, Tjilik Riwut, dan lainnya.

Kalimantan Selatan memiliki tokoh-tokoh pejuang dan beberapa telah diangkat dan ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional, seperti Pangeran Antasari, Brigjen Hasan Basri, Ir. Pangeran Mohamad Noor, dan Dr. K.H. Idham Chalid. Mereka ini merupakan tokoh Banua yang mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Atas jasa dan pengabdianya, mereka mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Pangeran Mohamad Noor sendiri menerima gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2018, bertepatan dengan upacara Hari Pahlawan di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penyerahan tanda kehormatan sebagai Pahlawan Nasional diserahkan kepada ahli waris beliau, yang saat itu diterima oleh Gusti Firdaus, salah seorang cucu P.M. Noor.<sup>2</sup>

Pada masa pendudukan pemerintah Kolonial, situasi Jakarta dan hampir semua wilayah mengalami tekanan. Oleh karena ketidaknyamanan itu, pada 4 Januari 1946, Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri serta Gubernur, termasuk Gubernur Kalimantan pindah ke Yogyakarta. Jadilah Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia.

Sebagai Gubernur yang berkedudukan di Yogyakarta, P.M. Noor menjadi pemimpin tertinggi untuk wilayah Kalimantan. Semua perjuangan di Kalimantan diatur dari Yogyakarta, termasuk mengatur

<sup>2</sup> <https://kumparan.com.banjarhits.id>, 10 November 2018, diunduh Rabu, 30 Oktober 2019.

strategi dan taktik perjuangan untuk mempertahankan Kalimantan sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Situasi yang berkejolak tidak menciutkan P.M Noor untuk berbuat. Bahkan atas inisiatifnya, ia membentuk pasukan MN 1001, pasukan payung RI Kalimantan yang dipimpin oleh Mayor Tjilik Riwut dan membentuk pasukan Gerilya ALRI Divisi IV di bawah pimpinan Letnan Hassan Basry. Kekuatan sejumlah laskar, pasukan bersenjata tumbuh berkembang di Kalimantan Selatan untuk mengusir Belanda/NICA. Hal ini semua tidak terlepas dari para pemikir yang ingin menegakkan dan membangun Kalimantan.

Pemerintah Belanda pada awalnya menyetujui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Untuk itu, segala siasat dilakukan agar Indonesia terpecah, seperti pelaksanaan perjanjian Lingarjati Maret 1947. Perjanjian ini merupakan upaya memecah belah kesatuan negara Indonesia, dalam hal ini Belanda hanya mengakui *de facto* Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra, sedangkan daerah lainnya di luar *de facto* RI yang artinya tetap berada dalam jajahan dan campur tangan mereka, termasuk Kalimantan.

Dalam uraian tulisan akan diungkapkan tentang jejak pemikiran tokoh Kalimantan Selatan yang menaruh perhatian terhadap sejarah perjuangan dan terbentuknya NKRI di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, Kalimantan Selatan berhasil terwujud dalam sebuah provinsi yang maju dan berkembang dalam pembangunan. Oleh karena itu, kajian pemikiran dari Ir. Pangeran Mohamad Noor dianggap penting karena beliau mampu menjadi pembawa perubahan dan peletak dasar pembangunan di Kalimantan Selatan.

Tulisan ini dibatasi dengan ruang lingkupnya agar berfokus mengungkap pemikiran dan wujud karya nyata tentang Pangeran Mohamad Noor. Tulisan ini dibatasi dengan batas temporal dan spasial. Batasan temporal dimulai sejak tahun 1923 yaitu pada saat P.M. Noor memulai aktivitasnya masuk kuliah di Bandung dan mengikuti kegiatan organisasi yang ingin membela dan memajukan nasib bangsanya. Kemudian tahun 1959, ketika beliau telah mewujudkan beberapa hasil karya nyata dalam pembangunan dan bahkan aktif dalam memberikan sumbang saran dan perhatian dalam pembentukan



daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah<sup>3</sup>. Batasan spasialnya meliputi daerah-daerah Kalimantan Selatan dan Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi. Sementara itu, batasan tematis penulisan, ingin mengungkapkan pemikiran Pangeran Mohamad Noor dalam kesatuan dan persatuan bangsa yang diwujudkankannya dalam perjuangan bersama rekan-rekannya sehingga Kalimantan Selatan maju dan berkembang.

## **A. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK YANG MEMENGARUHI PANGERAN M. NOOR TENTANG PERSATUAN DAN PEMBANGUNAN**

### **1. Kondisi Sosial dan Budaya**

Pada abad 17, Kerajaan Banjar dikenal sebagai “Serambi Mekah” karena masyarakatnya taat dalam menjalankan syariat Islam. Perkembangan Islam ini didukung dengan adanya ulama-ulama Banjar yang terkenal dan berdedikasi seperti Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, seorang ulama yang terkenal dengan karya tulisnya berupa kitab yang menjadi rujukan di berbagai negara. Kehidupan beragama di Kalimantan Selatan merupakan mayoritas Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya rumah ibadah berupa masjid, langgar, atau surau dengan ciri arsitektur kubah yang lebih sempurna.

Pembangunan rumah-rumah ibadah dibangun secara bergotong royong dan juga dari sumbangan warga yang pengumpulannya dilakukan di jalan-jalan dengan menugaskan petugas, dengan menggunakan kotak amal ataupun menggunakan jaring, sehingga orang yang berlalu lintas sambil lewat bisa memasukkan uang dan tidak terjatuh. Selain itu, pengumpulan dana juga dilakukan di beberapa rumah makan dan toko-toko dengan menitipkan kotak amal yang sudah diberi nama masjid. Ketika sumbangan sudah banyak maka petugas akan membuka kotak amal dan mengumpulkannya ke panitia pembangunan masjid yang sudah ditunjuk. Pembangunan masjid pun dilakukan secara bertahap dan sambil mengumpulkan dana yang dipergunakan. Selain itu, tradisi yang dilakukan dalam pengumpulan dana adalah melalui kegiatan sejenis bazar atau pasar amal. Di daerah Hulu Sungai dikenal dengan istilah *saprah amal*. Kegiatan *saprah amal* diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti warung amal, lelang, dan tablig

3 Tjilik Riwut, 2003, *Sanaman Mantikei, Maneser Panatau Tatu Hiang, Menyelami Kekayaan Leluhur*, h. 49.

akbar yaitu ceramah agama oleh para mubalig guna mengumpulkan partisipasi dana dari pengunjung.

Dalam menjalankan ibadah berjalan dengan baik dan nuansa Islam sangat kental terlihat pada hari-hari besar. Pada acara haul, seperti acara Haul Guru Sekumpul, Kabupaten Banjar selalu ramai. Pengunjung dari berbagai tempat datang untuk mengikuti acara. Dalam adat istiadat, masyarakat Banjar Kalimantan Selatan tetap menjalankannya, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Adat istiadat yang dilakukan juga bernapaskan Islam seperti pada tradisi adat perkawinan, khitanan, membangun rumah, dan kegiatan pertanian.

Sebagai keturunan bangsawan dari Kerajaan Banjar, Pangeran Mohamad Noor banyak belajar pendidikan Islam dari kedua orang tua dan lingkungan keluarga. Sejak kecil sudah diajarkan shalat, mengaji, puasa, dan membaca Al-Qur'an. Ia sudah biasa melafazkan surah al-Fatihah dan meminum air putih sebelum mengikuti ujian. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga ia duduk di bangku kuliah.

Dalam pergaulannya semasa bersekolah di Amuntai, Mohamad Noor bersahabat dengan semua teman. Ia tidak membedakan dari kalangan mana temannya meskipun ia dari kalangan bangsawan. Mereka bermain bersama di alam dan di semak-semak di Amuntai.

Semasa pendidikan di HIS di Banjarmasin, ayahnya Pangeran Ali ditugaskan di Pantai Hambawang, sebuah kota kecil antara Amuntai dan Barabai. Apabila libur, ia pulang ke Pantai Hambawang menjumpai orang tuanya. Perjalanan yang ditempuh dengan menggunakan perahu dan sepeda. Dari Sungai Bulu, ia naik jukung atau perahu kecil melintasi danau yang luas di Sungai Buluh. Berbagai tantangan yang dihadapi baik itu dari angin, cuaca, guntur, dan semua itu diterimanya karena situasi dan kondisi. Situasi demikian telah banyak menempa dirinya. Apalagi jika melihat bencana banjir yang melanda Amuntai yang terjadi hampir setiap tahun. Pengalaman ini yang menguatkan P.M. Noor untuk terus melanjutkan sekolah. Meskipun Mohamad Noor berada pada posisi lingkungan bangsawan, ia tidak membedakan pergaulannya semasa sekolah. Memang, jika dilihat dalam perannya, P.M. Noor berada pada lingkungan sosial yang berpengaruh apalagi beliau dibesarkan dari lingkungan Kerajaan Banjar yang dulunya sangat berpengaruh. Namun, semua cerita kejayaan masa lalu

Kerajaan Banjar, hanya sempat ia mendengar cerita dari orang-orang sekelilingnya.

## 2. Kondisi Lingkungan Politik

Pangeran Mohamad Noor tidak terlepas dari realitas politik Kerajaan Banjar pada masa kolonial. Pada masa awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mengalami perkembangan yang pesat dan mereka terkenal dengan program Politik Etis sebagai salah satu cara membalas budi. Saat itu pemerintah kolonialis memberi kesempatan kepada anak-anak bangsawan untuk menempuh pendidikan modern. Salah seorang yang beruntung adalah Pangeran Mohamad Noor dari Banjar.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, secara serentak hampir di setiap daerah melakukan pelucutan terhadap tentara-tentara Jepang. Demikian juga putra-putri Kalimantan yang ada di Jawa, mereka menggabungkan diri dalam organisasi Pemuda Republik Indonesia Kalimantan, di bawah pimpinan Abdoel Murad sebagai pemimpin dan Husin Hamzah sebagai komandan pertahanan dan bermarkas di sebelah BKR Surabaya, di depan Kantor Gubernur Jawa Timur (bekas kantor Kenpetai).

Pada Oktober 1945, Gubernur P.M. Noor dengan persetujuan Menteri Pertahanan Mr. Amir Syarifuddin memerintahkan Husin Hamzah untuk memimpin rombongan ekspedisi Kalimantan. Rombongan itu diperkirakan berjumlah 100 orang yang terdiri dari berbagai suku bangsa (Dayak, Melayu, Jawa, Sumatra, Banjar, dan lainnya). Sebelum berangkat, rombongan menghadap Presiden RI ke istana dengan ditemani oleh P.M. Noor.<sup>4</sup>

Dalam upaya pemberangkatan pasukan, Gubernur P.M. Noor menyadari bahwa pada saat itu yang menjadi persoalan adalah tentang dana. Apalagi, saat itu ia tidak memiliki dana pribadi yang bisa digunakan untuk membiayai perjuangan. Menjadi gubernur pada masa revolusi sangatlah berat karena memerlukan pengorbanan nyawa dan materi. Dalam menghadapi persoalan ini, P.M. Noor berkoordinasi dengan Bung Hatta. Sebagai jalan keluar, pada tahun 1946 Bung Hatta memberikan rekomendasi kepada Bank Negara Indonesia (BNI) agar

<sup>4</sup> Tjilik Riwut, 1958, *Kalimantan Membangun*, h. 111.

memberikan pinjaman kepada P.M. Noor sebesar Rp1.000.000, untuk dijadikan modal dasar membentuk fonds perjuangan yang revolving. Fonds pun terbentuk dan pinjaman dari BNI dapat dilunasi dalam waktu kurang dari jangka waktu pembayaran kembali.<sup>5</sup>

## **B. KEHIDUPAN KELUARGA DAN PENGABDIAN PANGERAN M. NOOR**

### **1. Kehidupan Keluarga Pangeran Mohamad Noor**

Mohamad Noor lahir di Martapura, 24 Juni 1901. Ayahnya bernama Pangeran Ali dan ibunya bernama Ratu Intan binti Pangeran Kesuma Giri. Kedua orang tuanya berasal dari keturunan Banjar. Ayahnya merupakan seorang kepala distrik yang disebut kiai yang tugasnya sering berpindah dari satu tempat/kota ke tempat/kota lain. Sejak masa kecilnya, Mohamad Noor tumbuh dan berkembang dalam lingkungan norma-norma keningratan. Ketika ia cukup dewasa maka gelar pangeran pun disematkan kepadanya. Hal ini sebagai tanda penerus Kesultanan Banjar sehingga namanya menjadi Pangeran Mohamad Noor. Setelah berkeluarga, sapaan beliau di kalangan keluarga dekatnya disebut Abah.<sup>6</sup>

Dalam pernikahan dengan Gusti Aminah binti Gusti Mohammad Abi, P.M. Noor dikaruniai 11 orang anak, yaitu

1. Gusti Mansyuri Noor,
2. Gusti Rizali Noor,
3. Gusti Mazini Noor,
4. Gusti Rusli Noor,
5. Gusti (lahir dan meninggal di Jakarta),
6. Gusti Darmawan Noor,
7. Gusti Didi Noor,
8. Gusti Hidayat Noor<sup>7</sup>,
9. Gusti Arifin Noor,
10. Gusti Suriansyah Noor, dan
11. Gusti Adi Darmansyah.

<sup>5</sup> Zuhri, 1981, h. 49.

<sup>6</sup> Orang-orang Banjar dan juga keluarga dekat menyebutnya Abah, dalam Artum Artha, 1975, *Membangun Kalimantan* h. 8. Kalangan tokoh dan masyarakat di Kalimantan Selatan menganugerahi gelar Abah Pembangunan karena karya-karyanya, dalam makalah Helius dan Bambang, 2016, "Biografi Singkat Ir. Pangeran Mohamad Noor", h. 1.

<sup>7</sup> Zuhri, Assikin, 1981, h. 21 dan usulan penganugerahan Pahlawan Nasional tahun 2015, h. 1.

Selama berkeluarga, beberapa kota yang menjadi tempat tinggal beliau adalah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Tegal, dan Surabaya.

## **C. PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN**

### **1. Pendidikan Mohamad Noor**

Jenjang pendidikan yang ada di Kalimantan Selatan merupakan warisan pendidikan zaman penjajahan yang dikenal dengan sebutan *Vervolgschool* atau Sekolah Rakyat yaitu pendidikan dasar untuk tingkatan paling rendah. Sekolah ini terdapat di setiap kecamatan dan sifatnya merata sehingga dapat memberikan kesempatan bagi rakyat banyak untuk menerima pendidikan dan pengajaran.

Dalam mengikuti pendidikan, P.M. Noor bersekolah di Sekolah Rakyat di Kotabaru dan Amuntai (1911), *Hollandsch-Inlandsche School* di Banjarmasin (1917), *Hogere Burgerschool* (HBS) di Surabaya (1923), dan *Technische Hoogeschool* (THS) di Bandung tahun 1927. Kini, THS menjadi perguruan tinggi di Bandung yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB). Selama kuliah di Bandung, beliau berkenalan dengan Soekarno (Presiden Soekarno). Usia mereka tidak jauh beda, Soekarno lebih tua 18 hari (6 Juni 1901).

Selama kuliah, P.M. Noor aktif pada kegiatan politik. Ia masuk anggota Jong Islamieten Bond (JIB) tahun 1925. Kegiatan ini diikutinya karena pengaruh pergaulannya dengan Soekarno dan pejuang pergerakan lainnya. Tidak dapat dimungkiri, perhatian P.M. Noor sejak masa kecil sudah melihat bagaimana keadaan kehidupan masyarakat diperlakukan tidak wajar oleh pemerintah kolonial Belanda dan ini berlanjut didengar setelah ikut dalam kegiatan diskusi dan debat politik yang membahas tentang kemerdekaan. Walaupun sibuk dalam kegiatan organisasi, P.M. Noor berhasil menyelesaikan kuliahnya dan mendapat gelar insinyur (Ir.) tahun 1927 dan beliau merupakan sarjana teknik yang pertama dari Kalimantan.<sup>8</sup>

Pada 1 Juli 1927, P.M. Noor diangkat sebagai insinyur sipil pada *Departement Verkeer & Waterstaat* (Perhubungan dan Pengairan) dan ditempatkan di Tegal, Jawa Tengah pada *Irrigatie Afd Brantas* (1927–1929, di Malang, Jawa Timur masih *Irrigatie Afd Brantas* (1929–1931).

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 24

Selanjutnya, P.M. Noor pindah ke Batavia (1931–1933) bekerja pada Departement Burgerlijke Openbare Werken (BOW) atau Departemen Pekerjaan Umum.

Tahun 1931–1939, P.M. Noor terpilih sebagai anggota Volksraad mewakili Kalimantan. Tahun 1933–1936, ia ditempatkan di Banjarmasin pada Departemen BOW. Tahun 1936–1937 diangkat sebagai *Gedelegeerde* Volksraad di Batavia dan 1937–1939 ditempatkan di Bandung pada Departement Verkeer & Waterstaat. Tahun 1939–1941 ditempatkan di Lumajang pada Irrigatie Afd Bekalen-Sampean. Tahun 1941–1942 (masuk masa Jepang) ditempatkan di Banyuwangi sebagai *Sectie-Ingeniur* pada Irrigatie Afd Bekalen-Sampean. Tahun 1942–1945 (masa Jepang) ditempatkan di Bondowoso sebagai Kepala Irigasi, Afd Bekalen-Sampean dan tahun 1945 diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan/Pekerjaan Umum. Pada masa menjelang Kemerdekaan, P.M. Noor ditunjuk sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Zyunbi Tyosakai*)<sup>9</sup>.

Jika dilihat dari tahun riwayat pekerjaannya, tampak P.M. Noor, tidak mempunyai waktu luang. Mulai masuk kuliah hingga selesai kuliah, beliau terus memberikan perhatian dan pemikiran untuk kebangsaan dan kemajuan pembangunan. Pengabdian yang tiada mengenal lelah. P.M. Noor pun ikut sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dan bahkan menjadi satu-satunya utusan Kalimantan dalam BPUPKI.

---

## 2. Pengabdian Sesudah Kemerdekaan

---

Setelah kemerdekaan, P.M. Noor pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada kabinet presidensial pertama (1945–1946) sampai terbentuknya Kabinet Syahrir. Tahun 1945–1950, beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Republik Indonesia dan pada tanggal 19 Agustus 1945<sup>10</sup>, ia diangkat sebagai gubernur pertama Kalimantan oleh Presiden Soekarno. P.M. Noor saat itu mendapat julukan sebagai Gubernur Perjuangan. Penunjukan P.M. Noor oleh Presiden saat itu sudah tepat karena beliau sebagai putra daerah yang lahir di Kalimantan dan sudah banyak mengetahui tentang keadaan daerahnya.

---

9 *Ibid.*, h. 24–25

10 Artum Artha, *loc. cit.*, h. 12

Sebagai langkah awal untuk mempersiapkan tugas sebagai kepala daerah, P.M. Noor perlu menyatukan semua komponen kekuatan dari para pejuang yang berada di Kalimantan maupun yang ada di Pulau Jawa. Beliau juga mempersiapkan organisasi masyarakat ataupun politik yang dapat mendukung pemerintahan Provinsi Kalimantan.

Selanjutnya, pada 2 September 1945, Gubernur P.M. Noor membentuk sebuah badan yang tugasnya untuk membantu tugas Gubernur, yaitu Badan Pembantoe Oesaha Goebornoer (BPOG). Adapun tujuan BPOG adalah sebagai berikut.

1. Menghimpun dan mempersatukan seluruh putra Kalimantan yang ada di Pulau Jawa untuk membantu perjuangan rakyat di Kalimantan baik secara politik, militer maupun ekonomi.
2. Membentuk cabang-cabang BPOG di daerah-daerah.
3. Membantu Gubernur Kalimantan Ir P.M. Noor melaksanakan tugasnya.<sup>11</sup>

Guna kelancaran tugas BPOG, Gubernur P.M. Noor memilih tempat markas BPOG di Jalan Embong Tanjung No. 17 Surabaya. Pada 10 Oktober 1945, mereka melakukan rapat untuk rencana peninjauan ke Kalimantan sebelum dilakukan pengiriman ekspedisi karena diharapkan bisa tiba di Kalimantan pada akhir Oktober 1945.

Namun, rombongan P.M. Noor tidak jadi berangkat ke Banjarmasin karena mata-mata musuh sudah mengintai dan menghalangi perjalanan mereka. Kapal yang akan mereka tumpangi pun ditembak dan tenggelam di laut. Di samping itu, peristiwa 10 November 1945 di Surabaya pun mengakibatkan rombongan tidak jadi berangkat.

Sebagai Gubernur Kalimantan yang berpusat di Yogyakarta dan guna memimpin perjuangan rakyat di Kalimantan, P.M. Noor membentuk pasukan MN 1001 yang akan dikirim ke Kalimantan dan dipercayakan kepada Tjilik Riwut. Dalam aksinya ini, sebagai seorang birokrat pejuang, P.M. Noor mampu menunjukkan kerja sama yang baik dengan pimpinan Angkatan Laut, Darat, dan Udara dalam menjalankan strategi infiltrasi bersenjata ke Kalimantan (Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Kalbar). Melalui kerja sama tersebut, P.M. Noor dapat mengoordinasikan para pejuang kemerdekaan melalui ekspedisi lintas laut dan udara ke wilayah Kalimantan.

<sup>11</sup> Hasan Basry, 1961, *Kisah Gerilya Kalimantan*, h. 52

Semenjak tidak menjabat sebagai Gubernur Kalimantan, P.M. Noor tinggal di Jakarta dan mendirikan Yayasan Dharma. Sebagai ketua yayasan, P.M. Noor dan anggotanya Sukardjo Wirjopranoto dan Prof. Mr. Dr. Supomo menerbitkan majalah mingguan politik kebudayaan *Mimbar Indonesia*<sup>12</sup> pada 10 November 1947. Mingguan ini diasuh oleh P.M. Noor dan Gusti Majur, S.H. dan beralamat di Gondangdia Lama 4 Jakarta.

Media nasional ini memiliki visi kebangsaan dan kesatuan bangsa. *Mimbar Indonesia* didirikan untuk memberikan penerangan serta menanamkan semangat dan keyakinan bernegara ketika Republik Indonesia diduduki oleh Belanda. Dalam media ini, P.M. Noor mengungkapkan strategi politiknya bahwa menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat penting dan menolak bentuk negara federal bentukan Belanda. Dalam strategi politik ini, P.M. Noor langsung di bawah pimpinan Wakil Presiden Mohamad Hatta yang saat itu sebagai pemimpin Panitia Pemikir Siasat<sup>13</sup>.



Gambar 2 Koran *Mimbar Indonesia* (Sumber: Koleksi Perpunas Jakarta)

12 Zuhri Asikin, 1981, h. 50

13 Panitia ini dibentuk pada April 1947. Pada awalnya merupakan Badan Perancang kemudian diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang langsung dipimpin oleh M. Hatta dan A.K. Gani sebagai wakilnya. Tugasnya adalah mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam melakukan perundingan dengan Belanda. (*m.kumparan.com-dikPembentukan Badan Perancang Ekonomi*, diunduh 26 November 2019).





Gambar 3 Koran *Mimbar Indonesia* dengan moto "Suara Rakyat Membangun"

Mengingat pemikiran dan pengabdian yang sudah diberikan sejak awal hingga setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, P.M. Noor sudah layak disebut sebagai *founding father* atau Bapak Bangsa<sup>14</sup> dan teknokrat yang visioner.

## D. USAHA YANG DILAKUKAN P.M. NOOR UNTUK MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN PEMBANGUNAN

### 1. Kiprah dalam Politik dan Persatuan

Pada masa Hindia Belanda (1931), P.M. Noor menjadi anggota *Volksraad*<sup>15</sup> (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk wilayah Kalimantan *Afdeelsraad* Barabai. Sementara itu, Pangeran Ali yang Kiai atau Kepala Distrik pernah menjabat sebagai anggota DPRD di Banjarmasin. Sebagai anggota *Volksraad* dan juga pegawai negeri di pemerintahan Hindia Belanda, ia tidak menyukai tindakan pemerintah Hindia Belanda dan pada suatu sidang terbuka *Volksraad*, dengan berani ia mencela tindakan pemerintah Hindia Belanda yang menekan harga karet rakyat. Atas tindakannya itu, ketua *Volksraad* mencabut hak berbicara baginya. Demikian juga pada perjuangan di *Volksraad*, ia sebagai utusan dari Partai Politik Indonesia Raya (Parindra) bersama M. Husni Thamrin, dan beberapa anggota tidak setuju akan isi Petisi

<sup>14</sup> Helius Sjamsudin, 2015, *Kiprah Perjuangan dan Pengabdian Ir. P.M. Noor dalam Dinamika Sejarah Bangsa*, h. 1 dan "P.M. Noor Sang Bapak Bangsa, Bidang Infokom DHD 45, Provinsi Kalsel", makalah disampaikan pada acara seminar calon Pahlawan Nasional November 2015.

<sup>15</sup> Sejenis parlemen bentukan Belanda (Dewan Rakyat) dan dianggap sebagai media untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan yang duduk di sini terdiri dari golongan intelektual dan mereka untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan lebih ke arah demi kesejahteraan rakyat. <http://id.m.wikipedia.org> dan <http://brainly.co.id>, diunduh 30 Oktober 2019.

Soetarjo, yang isinya tentang hubungan ketatanegaraan antara Hindia Belanda dan Negeri Belanda.

Sebagai Gubernur Kalimantan, Ir. P.M. Noor menginstruksikan agar membentuk gerakan-gerakan untuk menegakkan kemerdekaan, seperti BPPKI di bawah pimpinan M. Jusi, Djantera, R. Soejitno, H. Bidjuri, Norman Umar, H. Sibli Imansyah, H. Maki, H. Baseri dan lainnya dan di Martapura dipimpin oleh Gusti Saleh<sup>16</sup>.

P.M. Noor berasal dari kalangan bangsawan, tetapi dalam sikap dan pertemanan, beliau selalu berbaur dengan anak-anak lainnya. Pekerjaan ayahnya, Pangeran Ali, sebagai kepala distrik yang selalu berpindah mengajarkan P.M. Noor untuk lebih banyak mengenal orang-orang lain dan melihat keadaan di berbagai tempat. Latar belakang kehidupan masyarakat yang dilihatnya menjadi inspirasi baginya.

## **2. Kiprah dalam Pembangunan**

Pengalaman adalah guru yang baik. Hal ini menjadi salah satu inspirasi bagi P.M. Noor untuk bisa berkiprah dalam kegiatan pembangunan. Sewaktu ia bersekolah di Amuntai dan ayahnya bertugas di Kota Baru, Pulau Laut, P.M. Noor melihat bahwa alam Kalimantan sungguh kaya raya. Hutan, sungai, dan laut menjadi sumber yang potensial yang kelak dijadikan kekayaan Kalimantan. Demikian juga dengan daratan yang sebagian besar terdiri dari tanah rawa. Melihat keadaan sedemikian, tumbuh semangat dan cinta P.M. Noor untuk membangun negeri.

Tahun 1933 merupakan saat yang tepat bagi P.M. Noor untuk mengabdikan dan menyumbangkan ilmunya di Banjarmasin. Sebagai insinyur sipil yang membidangi pengairan, ia akan mengupayakan bidang ketahanan pangan melalui proyek irigasi Sungai Barito.

Pengalamannya di bidang pengairan serta kecintaan terhadap tanah air, menjadikan P.M. Noor selalu siap ditugaskan di mana saja sehingga beberapa tempat sudah dijalani demi tugasnya. Bahkan, pada masa pendudukan Jepang, pada saat mereka membutuhkan tenaga kerja untuk membangun infrastruktur dan menyediakan sumber pangan untuk kepentingan perang, Pemerintahan Jepang menugaskan P.M. Noor sebagai kepala irigasi/pengairan Pekalem-Sampean di

<sup>16</sup> Tjilik Rivut, *loc. cit.*, h. 102.

Bondowoso. Beliau diangkat sebagai wakil Sumobucho (sekretaris jenderal) pada Doboku atau Departemen Perhubungan/Pekerjaan Umum.<sup>17</sup>

Satu hal yang menjadi inspirasi bagi P.M. Noor, sebelum Proklamasi Kemerdekaan, ia mendapat perintah untuk menghubungi seorang pemimpin Indonesia di Hotel Oranje Surabaya. Ternyata di sana ada M. Hatta yang akan mengajak untuk melakukan tugas kunjungan ke Banjarmasin dalam rangka persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perjalanan dari lapangan terbang menuju Banjarmasin, Bung Hatta membuka pembicaraan dan meminta kepada P.M. Noor agar dapat memanfaatkan pengalaman sebagai seorang insinyur irigasi untuk dapat mengolah padang alang-alang dan gambut menjadi sawah yang subur. Ini salah satu tekad P.M. Noor dalam mewujudkan pembangunan terlebih setelah terobsesi dari ajakan Bung Hatta.

Pada tahun 1950–1956, P.M. Noor menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Tahun 1956–1959, beliau diangkat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo II dan Kabinet Karya. Sewaktu menjabat sebagai anggota DPRS, P.M. Noor sudah mengusulkan beberapa kegiatan besar di depan sidang DPRS, seperti Proyek Sungai Barito yang pekerjaan pengerukannya dilakukan hingga tahun 1970. Jika Sungai Barito selesai dikeruk dan layak dilewati oleh kapal-kapal maka roda perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah akan meningkat. Sebelumnya, jika hujan maka Sungai Barito akan banjir dan menggenangi areal persawahan. Sebaliknya, jika musim kemarau, Sungai Barito mengalami kekeringan.

P.M. Noor pun menggagas pembangunan PLTA Riam Kanan, dengan membendung delapan sungai. Akhirnya PLTA Riam Kanan rampung dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 30 April 1973. Keberhasilan pembangunan PLTA ini sangat mendukung untuk pemenuhan kebutuhan listrik untuk daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

---

<sup>17</sup> Zuhri Asikin, 1981, h. 25.

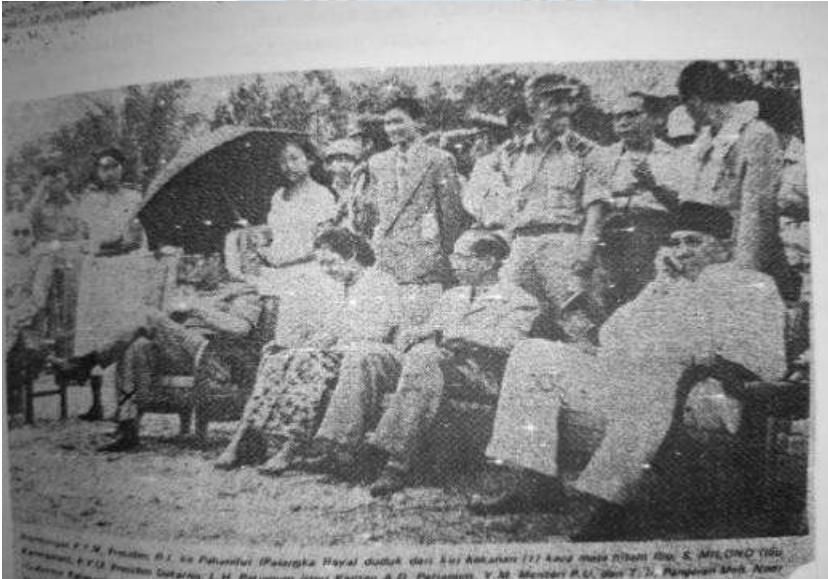


Gambar 4 Monumen di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.  
(Sumber: Data Lapangan, 10 Agustus 2019)



Gambar 5 Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Riam Kanan, berubah menjadi PLTA  
Ir. H. P.M. Noor Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.  
(Sumber: Data Lapangan, 10 Agustus 2019)

Sebagai Menteri Pekerjaan Umum (1957–1959), P.M. Noor juga berjasa ikut serta dalam memikirkan pembangunan dan pembentukan Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Dana yang digunakan dari Kementerian PUT pun cepat dikeluarkan guna pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Pada saat kunjungan Presiden Soekarno ke Kampung Pahandut dan pemancangan tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya, beliau ikut serta hadir.



Gambar 6 Ir. P.M. Noor yang ikut dalam rombongan Presiden RI Soekarno di Pahandut, Palangka Raya pada 17 Juli 1957 saat pemancangan tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya. (Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, h. 17)

## E. AKHIR HAYAT

P.M. Noor meninggal pada 15 Januari 1979 di RS Pelni Jakarta dan dikuburkan di TPU Karet. Beliau meninggal pada usia 77 tahun dan dimakamkan di samping istrinya Gusti Aminah. Pemakaman dilakukan dengan upacara kenegaraan dan disemayamkan di gedung MPR/DPR Senayan dengan upacara pelepasan jenazah dipimpin oleh Daryatmo, selaku Ketua MPR/DPR. Saat itu, bangsa Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Selatan khususnya sangat kehilangan putra terbaiknya. Tanda simpati dan ungkapan duka berdatangan dari tokoh-tokoh nasional dan teman-teman seperjuangannya.

Selanjutnya, pada 18 Juni 2010 (31 tahun semenjak meninggal), atas permintaan keluarga, kerangka P.M. Noor dan istrinya \ dipindahkan dari TPU Karet ke kompleks Pemakaman Sultan Adam Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Acara pemindahan dilakukan dengan acara militer dan dihadiri oleh seluruh masyarakat yang mengenal dan kerabat keluarga dari Kesultanan Banjar. Upacara dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar, Ir. H. Gusti Khairul Saleh, M.M.

Jenazah ditempatkan pada satu atap dengan makam Sultan Adam dan acara pemakaman berjalan dengan baik. Satu semboyan yang sangat berarti, pada saat kondisi tubuh mulai menurun dan sebelum akhir hayatnya, P.M. Noor berkata, “Teruskan ... Gawi Kita Balum Tuntung”, yang artinya “Teruskan ... pekerjaan kita belum selesai”. Perkataan beliau ini cukup dalam artinya dan tinggal bagaimana kita untuk memaknainya.



Gambar 7 Acara pemindahan Jasad P.M. Noor dan istri di Banjarbaru.

Pemakaman dilakukan secara militer.

(Sumber: Disbudpar Banjarbaru, 2019)

## Balai Pelestarian Nilai Budaya



Gambar 8 Pemimpin upacara dan keluarga besar P.M. Noor di lokasi Pemakaman Sultan Adam.

(Sumber: Disbudpar Banjarbaru, 2019)



Gambar 9 Pemindahan Jasad P.M. Noor dan istri di Kompleks Makam Sultan Adam  
(Sumber: Disbudpar Banjarbaru dan Sumber Lapangan)

## F. SIMPULAN

Mohamad Noor yang kemudian dikenal dengan nama lengkapnya Ir. Pangeran Mohamad Noor merupakan tokoh yang pantas menjadi panutan. Penampilannya sederhana, memiliki semangat yang tinggi, rela berkorban, dan mempunyai wawasan yang luas.

Pengalaman menjadi inspirasi bagi P.M. Noor dan menambah semangatnya untuk bisa bangkit. Walaupun berasal dari kalangan bangsawan, ia tidak membedakan teman dan tidak sombong. Ia selalu memberikan perhatian bagi yang memerlukannya. Pengalaman yang dilihat semasa ayahnya bertugas menjadi sumber inspirasi dan menjadi sumbangannya untuk mencintai tanah air melalui kemerdekaan, bidang pembangunan demi kemajuan bangsa dan negara.

Sebagai seorang insinyur dan teknokrat, pemikiran dan karya besar P.M. Noor telah nyata dalam pembangunan PLTA Riam Kanan dan akhirnya diberi nama PLTA Ir. P.M. Noor dan proyek pengembangan wilayah Sungai Barito, proyek pasang surut, dan meningkatkan usaha transmigrasi (Trans-Sumatra Water Way dan Kalimantan Coastal Canal), serta proyek perluasan persawahan pasang surut.

Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, P.M. Noor berhasil membangun persatuan dan kesatuan karena pasukan yang dibangunnya berasal dari semua wilayah Kalimantan. Dengan demikian, beragam etnis dan agama bisa berkumpul dalam satu wadah perjuangan Pasukan MN 1001. Beliau berhasil membangun kebangsaan pada masa revolusi.

Pemikiran P.M. Noor juga diwujudkan dengan mendirikan majalah *Mimbar Indonesia* di Jakarta. Majalah yang mempunyai visi kebangsaan dan kesatuan bangsa dan dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ia berperan dengan menolak bentuk negara federal buatan Belanda.

Semasa hidupnya, perjuangan, pemikiran, dan pengabdian sudah beliau berikan dan kini P.M. Noor sudah tiada dan hanya meninggalkan amal ibadah serta nama. Sebagai upaya untuk mengenang jasa-jasanya, nama beliau sudah diabadikan menjadi nama monumen dan nama jalan, seperti Jalan Ir. Pangeran Mohamad Noor yang ada di Kalimantan Selatan dan Monumen Pangeran Mohamad Noor di Kecamatan Aranio, serta nama Pembangkit Listrik Tenaga Air Ir. H.P.M. Noor di Riam Kanan.



Gambar 10 Wawancara dengan Gusti Firdauzi Noor, salah seorang cucu P.M. Noor.  
(Sumber: Data Lapangan, 16 Agustus 2019)



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman. 2015. "Ir. Pangeran Mohammad Noor (1901–1979) Sebagai Pahlawan Nasional". Makalah disampaikan pada acara pengusulan Ir. Pangeran M. Noor sebagai Pahlawan Nasional dari Kalimantan Selatan.
- Artha, Artum. 1975. *Membangun Kalimantan*. Banjarmasin: s.n.
- Barjie B., Ahmad. 2019. *4 Pahlawan Nasional dari Banjar Kalimantan Selatan*. Banjarbaru: Penakita Publisher.
- Basri, Hasan. 2013. *Pemikiran Sukarno tentang Persatuan Indonesia Tahun 1926–1965*. Skripsi Universitas Jember.
- Basry, Hassan. 1961. *Kisah Gerilya Kalimantan*. Banjarmasin: Yayasan Lektur Lambung Mangkurat.
- Daliman, A. 2015. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kemdikbud. t.t. *Gubernur Pertama di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Dirjenbud, Kemdikbud.
- Nasution, A.H. t.t. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 7: Periode Renville*. Bandung: Penerbit Disjarah-Ad dan Angkasa Bandung.
- Nawawi, Ramli, dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945–1949) Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Depdikbud Dirjenbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
- Nugroho, Porda. 2015. "Ir. Pangeran Mohamad Noor: Fakta Otentik sebagai Pahlawan Nasional". Makalah disampaikan pada acara pengusulan Ir. Pangeran M. Noor sebagai Pahlawan Nasional dari Kalimantan Selatan.
- Sjamsuddin, Helius. 2012. *Metode Sejarah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Ombak.
- \_\_\_\_\_. 2014. "Kiprah Perjuangan dan Pengabdian Ir. Pangeran Mohammad Noor dalam Dinamika Sejarah Bangsa". Makalah disampaikan pada acara pengusulan Ir. Pangeran M. Noor sebagai Pahlawan Nasional dari Kalimantan Selatan.

Wajidi. 2015. "P.M. Noor Sang Bapak Bangsa". Makalah disampaikan pada acara pengusulan Ir. Pangeran M. Noor sebagai Pahlawan Nasional dari Kalimantan Selatan.

Zuhri, Asikin.1981. Ir. P.M. Noor, Teruskan... Gawi Kita Belum Tuntung. Banjarmasin: DHD 45 Kalimantan Selatan.

### **Koran:**

Banjarmasin Post, Kamis, 5 November 2015, "Usulkan P.M. Noor Jadi Pahlawan Nasional".

### **Laman**

<https://bubuhanbanjar.wordpress.com/2016/01/27/ir-p-m-noor-sang-bapakbangsa/?fbclid=IAR3WkycXBbj0Odf9Mu19jSnz5PO4sUvcQw4cmic21gosgdr9PdclPcgJFgI>, diunduh 15 Februari 2019.

<https://tirto.id/pahlawan-nasional-2018-m-noor-pelopor-infrastruktur-kalimantan>, diunduh 15 Februari 2019.

<http://id.m.wikipedia.org/Volksraad>

<http://brainly.co.id>, *Volksraad dianggap sebagai media untuk menyalurkan aspirasi rakyat.*, diunduh 30 Oktober 2019.

<https://daerah.sindonews.com/read/1185079/29/mengenal-pangeran-muhammad-noor-gubernur-pertama-kalimantan-1488537187>, 15 Februari 2019.

<https://www.liputan6.com/regional/read/3687365/cerita-mohammad-noor-lolos-dari-bom-pertempuran-surabaya> 15 Februari 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4294294/pm-noor-sang-ahli-strategi-dan-bapak-pembangunan-dari-kalimantan> 15 Februari 2019.

### **Informan**

1. Dr. M. Zainal Anis, 62 Tahun, Dosen UNLAM, Banjarmasin;
2. Wajidi, M.Si., 51 Tahun, PNS Balitbangda, Banjarmasin;
3. Haji Gusti Mardekansyah, 56 tahun, guru swasta, Banjarbaru;
4. Gusti Marjanish, 50 tahun, PNS, Banjarbaru;
5. Gusti Firdauzi Noor, 50 Tahun, swasta, Depok, Jakarta.



---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

# Satu Dayak dan Menjadi Indonesia-Dayak: Impian Persatuan Bangsa dalam *Soeara Pakat* Terbitan Banjarmasin pada Tahun 1940-an<sup>18</sup>

Dana Listiana

Niels Mulder melakukan kajian kritis terhadap buku-buku pelajaran sejarah Indonesia. Kritik yang juga dapat ditemukan dalam banyak historiografi Indonesia, antara lain cenderung paranoid akan keberagaman, memunculkan faktor-faktor determinan seragam atas momen sejarah yang terjadi di berbagai daerah, dan menempatkan masa lalu dalam batas politik masa kini. Dengan demikian, sejarah gagal ditempatkan dalam situasi sezaman dan setempat sehingga terputus dari proses menjadi dan meniadakan hubungan antara masa lalu dan masa kini (Mulder, 2000: 40–48; 103–111).

Kealpaan tersebut dapat dilihat dalam sejarah lokal di Kalimantan Selatan pada periode yang umum dikategorikan sebagai pergerakan kebangsaan atau kebangkitan nasional.<sup>19</sup> Narasi tentang pergerakan para pemuda Dayak bernama Pakat Dayak tidak dimuat, seperti dalam historiografi berjudul *Sejarah Gerakan Kepemudaan di Kalimantan*

18 Dipresentasikan pada Seminar Hasil Penelitian BPNB Kalimantan Barat “Merajut Pemikiran Bangsa, Menggali Warisan Budaya Kalimantan, 2–5 November 2019 di Singkawang.

19 Padahal, selain memberi gambaran kehidupan bermasyarakat menjadi realistis karena Banjarmasin adalah rumah bagi beragam etnik, narasi gerakan pemuda Dayak tersebut dapat menjelaskan terbentuknya Kalimantan Selatan baik sebagai unit administrasi pemerintahan maupun satuan wilayah berasosiasi etnik ‘Tanah Banjar’.

Selatan<sup>20</sup>, Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan<sup>21</sup>, dan Sejarah Daerah Kalimantan Selatan<sup>22</sup>. Sebaliknya, sejarah daerah Kalimantan Tengah menyempitkan pembahasan aktivitas dan pengaruh Pakat Dayak terbatas pada skop daerah tersebut, seperti dalam Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Tengah<sup>23</sup>, Pakat Dayak: Sejarah Integrasi dan Jatidiri Masyarakat Dayak & Daerah Kalimantan Tengah<sup>24</sup>, dan Sarekat Dayak: Peranannya dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan di Kalimantan Tengah<sup>25</sup>.

Dalam upaya mengisi kekosongan dalam narasi sejarah, tulisan ini mendiskusikan gerakan para pemuda Dayak tersebut, khususnya dinamika gagasan yang mengemuka dalam organ publikasi yang dalam istilah mereka disebut propaganda. Tulisan ini berfokus pada pembahasan pergumulan ide para intelektual muda di tanah rantau ketika mereka jauh dari kampung halaman. Tulisan yang mengangkat fenomena umum periode pergerakan nasional ini bertolak dari situasi yang dinyatakan Miert sebagai rasa terasing dan berbeda dari lingkungan memunculkan getaran kesatuan para pemuda rantau yang berujung pada pembentukan ikatan kelompok (Miert, 2003: 97–98). Jika Miert menyoroti usaha para pemuda Sumatra dalam membangun ikatan kelompok berdasarkan kesatuan wilayah, tulisan ini mengangkat usaha para pemuda Kalimantan dalam membangun ikatan etnik.

Diskusi tentang gerakan berlatar etnik telah menjamur sejak B.J. Habibie menjabat presiden. Kesempatan yang dibuka untuk menerapkan adat dalam lembaga-lembaga pemerintahan di daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi telah memacu fenomena “kebangkitan adat”. Berbagai bentuk manifestasi “kebangkitan adat” di seluruh Indonesia, termasuk yang terjadi pada komunitas Dayak di Kalimantan menjadi perhatian para peneliti sosial (Bourchier, 2010: 125–126).

20 Mansyur dkk. 2018. *Sejarah Gerakan Kepemudaan di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.

21 Wajidi. 2007. *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901–1942*. Banjarmasin: Pustaka Banua.

22 Saleh, Idwar, dkk. 1977/1978. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Depdikbud.

23 Dese, Anthel, dkk. 1978/1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Tengah*. Jakarta: Depdikbud.

24 Usop, K.M.A.M. 1994. *Pakat Dayak: Sejarah Integrasi dan Jatidiri Masyarakat Dayak & Daerah Kalimantan Tengah*. Palangkaraya: Yayasan Pendidikan & Kebudayaan Batang Garing.

25 Asnaini. 2011. *Sarekat Dayak: Peranannya dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan di Kalimantan Tengah*. Pontianak: BPSNT Pontianak.

Kajian terkait “kebangkitan adat” Dayak yang belakangan terbit menyoroti periode pasca-Orde Baru. Sejumlah kajian terkini ditinjau guna mengontekstualisasi gagasan yang didiskusikan dalam tulisan ini, yakni persatuan dan etnik, dalam hal ini Dayak.

*The (Re)Construction of the ‘Pan Dayak’ Identity in Kalimantan and Serawak: A Study on Minority’s Identity, Ethnicity and Nationality* karya Thung Ju Lan, Yekti Maunati, dan Peter Mulok Kedit bertujuan untuk memahami kemunculan identitas “Pan Dayak” dalam konteks lokal, regional, dan nasional bertolak dari konflik komunal di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sekitar satu dekade lalu. Thung dkk. (2004) mengidentifikasi perubahan makna identitas Dayak tidak hanya di Kalimantan, Indonesia, tetapi juga di Serawak, Malaysia. Mereka menunjukkan bahwa pada masa kini, orang Dayak memiliki beberapa identitas yang tidak statis, yakni identitas sub-etnik, etnik, wilayah, warga negara, dan agama. Berbagai identitas tersebut mengemuka secara bergantian bergantung pada situasi individu. Secara umum, identitas Dayak efektif digunakan dalam laga politik yang di Indonesia menguat setelah desentralisasi.

Thung dkk. menelaah latar historis dalam kajian tersebut, namun kisah marginalisasi Dayak yang diangkat memang berfokus pada era Orde Baru. Mereka menempatkan “kebangkitan adat” dewasa ini sebagai rekonstruksi dari gejala yang sama pada masa lalu. Akan tetapi, gejala masa lalu yang memang bukan fokus kajian dan hanya dinotifikasi.<sup>26</sup> Gejala masa lalu atau tepatnya salah satu bagian dari proses yang oleh Thung dkk. Disebut sebagai konstruksi identitas Dayak adalah inti pembahasan dalam tulisan ini.

Tulisan Gerry van Klinken berjudul “Dayak Ethnogenesis and Conservative Politics in Indonesia’s Outer Islands”<sup>27</sup> membahas pembentukan kelompok kelas menengah perkotaan yang berupaya mendeskripsikan etnisitasnya sendiri dan mendiskusikan kondisi masyarakat dan demokrasi di luar Jawa. Klinken (2007) berpendapat bahwa kelompok etnik Dayak yang sadar politik lahir dari relasi Misi

26 Proses konstruksi identitas meliputi pertemuan Tumbang Anoi tahun 1894 hingga pembentukan Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak pada 1979 secara ringkas disampaikan Thung dkk. dalam 1,5 halaman. Informasi tentang Pakat Dayak dan pembentukan sejumlah organisasi etnik pun sepertinya terlewat untuk diverifikasi.

27 Artikel Gerry van Klinken berjudul “Dayak Ethnogenesis and Conservative Politics in Indonesia’s Outer Islands” adalah versi perbaruan dari versi cetak yang terbit pada 2004 dalam buku *Indonesia in Transition: Rethinking Civil Society, Region, and Crisis*.

Kristen, masyarakat Dayak, dan Banjar dalam pembentukan negara kolonial modern. Artikel Klinken membantu dalam memahami konteks historis diskusi wacana dalam tulisan ini. Karena berfokus membahas situasi masyarakatnya, artikel Klinken tidak menyoroti dialog ide yang mengemuka dalam kelompok sebagaimana dalam tulisan ini.

Artikel lain Klinken berjudul “Mengkolonisasi Borneo: Pembentukan Provinsi Dayak di Kalimantan” membahas upaya lanjutan dari pembentukan identitas bangsa yakni wilayah pemerintahan sendiri pada akhir periode kolonial dan awal pemerintahan republik. Klinken (2011) menunjukkan bahwa cita-cita tersebut bukan murni berasal dari dalam kelompok Dayak, melainkan dirancang oleh Pemerintah Kolonial. Pemerintah Kolonial menyediakan perangkat hukum dan kelembagaan kolonial seraya menciptakan situasi sosial pelecut aksi, yang dalam hal ini rivalitas etnik Dayak dan Banjar. Selanjutnya, Klinken menunjukkan penciptaan dan pengembangan konsep dan strategi kelompok Dayak dalam merealisasi cita-cita yang telah dibayangkan. Artikel Klinken membantu memahami konteks historis dan kontinuitas gagasan dalam bentuk tindakan.

Kontinuitas historis gagasan “bersatunya” ratusan kelompok heterogen dalam bentuk gerakan etnik Dayak juga dikerjakan oleh Jamie Seth Davidson<sup>28</sup> dan Taufiq Tanasaldy. Keduanya sama-sama melakukan *trajectory* politisasi etnisitas di Kalimantan Barat, daerah yang lebih belakangan mengadakan gerakan persatuan etnik Dayak atau tepatnya merupakan daerah pengaruh gerakan Pakat Dayak. Berfokus pada praktik kekerasan kolektif, Davidson (2002) dalam *Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia*<sup>29</sup> berpendapat

28 Jamie S. Davidson dalam “Primitive Politics: The Rise and Fall of the Dayak Unity Party in West Kalimantan, Indonesia” membahas berdiri dan jatuhnya Partai Persatuan Dayak di Kalimantan Barat pada awal kemerdekaan Indonesia. Davidson (2003) menunjukkan bahwa organisasi Dayak pertama di Kalimantan Barat yang dipengaruhi oleh Pakat Dayak ini bergerak di bidang politik.

29 Jamie S. Davidson kurang cermat dalam memaknai sumber teks. Sejumlah pemaknaan keliru Davidson antara lain ketika pernyataan “anti-feodalisme dan anti-Belanda” dari Oevang Oeray dimaknai sebagai “anti-Melayu dan anti-Belanda”. Secara substansial, bukti sejarah menunjukkan bahwa praktik feodalisme di Kalimantan Barat yang meski kerap melibatkan elemen masyarakat (penguasa) Melayu juga berhubungan dengan etnik lain yang berarti tidak bersih dari praktik tersebut. Selain itu, seharusnya Davidson membandingkan dengan pernyataan lain Oevang Oeray tentang hubungan “Melayu dan Dayak” yang disebutnya sebagai “sedarah seketurunan” sehingga tidak benar jika saling menyakiti. Pemaknaan Davidson juga terkesan memaksakan dalam menguatkan argumennya tentang rivalitas etnik (dan atau agama) ketika menyatakan pembentukan Sarekat Dayak untuk menghadapi keberadaan Sarekat Islam. Pendapat Davidson terbantahkan oleh bukti-bukti dari koran sezaman yang

bahwa kekerasan dalam kondisi tertentu dapat mempersatukan dan memperkuat etnisitas yang biasanya muncul dalam pelaksanaan kekuasaan. Sementara itu, Tanasaldy (2012) dalam *Regime Change and Politics in Indonesia: Dayak Politics of West Kalimantan* berpendapat bahwa politisasi etnisitas di Kalimantan Barat adalah penimbunan perasaan tertekan akibat marginalisasi komunitas Dayak pada setiap rezim politik. Tanasaldy juga menunjukkan bahwa ikatan persatuan orang Dayak menguat saat mengajukan pemimpin politik. Rivalitas yang kerap berujung konflik etnik diselesaikan dengan kompromi etnik yang efektif mencegah kekerasan etnik. Kedua tulisan ini ditinjau dalam melakukan kontekstualisasi gagasan persatuan Dayak.

Tulisan-tulisan tersebut menjelaskan kelanjutan atau deviasi bentuk persatuan etnik. Penjelasan mengenai tahapan saat sekelompok masyarakat masih mengidentifikasi diri dan mendefinisikan identitas untuk menciptakan persatuan dan kemudian membangun kesadaran etnik belum (atau tidak) fokus dibahas.

Oleh karena itu, tulisan ini mempertanyakan dua hal berikut.

1. Impian persatuan bangsa seperti apa yang mengemuka dalam *Soeara Pakat* tahun 1940?
2. Bagaimana dan mengapa impian tersebut mengada?

Dengan demikian, tulisan ini bermaksud menjelaskan gagasan “persatuan” yang dikemukakan dalam sebuah organ propaganda Pakat Dayak, sebuah organisasi berlandaskan etnik yang pada akhir masa kolonial masih berproses membangun identitasnya. Tulisan ini berpijak pada “persatuan” yang digunakan sebagai tajuk koran tanpa memberi batasan khusus, baik etnik maupun wilayah tertentu agar lebih luwes mengeksplorasi gagasan yang mengemuka terkait persatuan. Tulisan ini diharapkan mampu menyuguhkan ‘*history from within*’ mengenai ide awal persatuan bangsa versi masyarakat Kalimantan<sup>30</sup> sebelum diisi oleh memori-memori seragam dari kanon sejarah daerah dan nasional. Lebih lanjut, tulisan ini akan menangkap kompleksitas gejala sehingga realitas masyarakat setempat dapat dipahami.

---

justu menunjukkan ketertarikan Hausman Baboe, pendiri Sarekat Dayak terhadap pemikiran Tjokroaminoto dan Sarekat Islam.

30 Secara umum, penulis menggunakan istilah Kalimantan. Akan tetapi, penggunaan istilah Borneo dan Kalimantan terkait konten akan dipertahankan untuk memahami konteks jiwa zaman para pelaku sejarah (redaksi) yang sedang didiskusikan.



Untuk menjelaskan pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan metode sejarah. Tahap pertama adalah heuristik mencakup penelusuran sumber pustaka dan lisan. Penelusuran sumber pustaka primer berupa surat kabar dilakukan di Perpustakaan Nasional RI dan pustaka sekunder di Banjarmasin. Sumber primer yang dihimpun terutama *Soeara Pakat* tahun 1940 dan 1941 serta media sezaman lain yang membicarakan tentang Sarekat Dayak, Pakat Dayak, dan aktivitas para tokoh, serta organisasi pergerakan sezaman yang berkembang di Kalimantan, khususnya Keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur yang secara politik berada dalam pengaruh elite intelektual Banjar dan kebijakan politik Pemerintah Kolonial di daerah. Penelusuran sumber lisan di Banjarmasin dilakukan terhadap sejumlah intelektual sekaligus pelestari dan penulis tentang sejarah dan atau kebudayaan Ngaju, Bakumpai, Banjar, dan Kalimantan Selatan. Informasi yang dihimpun adalah kondisi sosial masyarakat dan memori pribadi atau yang terpelihara di lingkungan tentang Pakat Dayak dan tokoh-tokoh pendirinya.

Sumber-sumber yang terkumpul dalam tahap heuristik kemudian diverifikasi melalui tahap kritik. Proses kritik yang terbilang berat adalah membandingkan berbagai data yang memuat informasi sama, beririsan, dan satu sama lain seringkali melengkapi namun sekaligus mengandung perbedaan. Contoh yang paling sederhana namun rumit adalah mengkritik berbagai sumber yang berbicara tentang hubungan antara Sarekat Dayak, Pakat Dayak, dan Persatuan Dayak ataupun sumber tentang latar belakang tokoh dan sudut pandangnya.

Data-data yang telah dikritisi selanjutnya dianalisis dalam tahap interpretasi menggunakan pendekatan wacana-historis (*DHA-discourse historical approach*). DHA adalah pendekatan dalam wacana kritis (*CDA-critical discourse analysis*) yang berorientasi secara linguistik pada sejarah konteks dan mengkritisi teori sosial yang telah mapan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharap dapat mengintegrasikan sejumlah besar pengetahuan mengenai sumber-sumber historis dan latar belakang sosial dan politik di mana kegiatan diskursif tertanam (Wodak dalam Candraningrum, 2018: 558- 81).

Analisis wacana didahului dengan analisis isi berupa kategorisasi isi edisi *Soeara Pakat* No. 1-6 dan 8 tahun 1940 dan No. 3 tahun 1941. Analisis isi menghasilkan sejumlah artikel yang dipilih berdasarkan

kriteria yang diajukan dalam perumusan masalah, yakni terkait dengan isu persatuan. Artikel terpilih kemudian diinterpretasi lebih lanjut. Interpretasi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu membaca teks, memahami konteks, dan mengontekstualisasi.

Terakhir adalah tahap historiografi. Pada tahap ini, hasil interpretasi dirangkai menjadi kesatuan peristiwa sejarah secara kronologis sehingga harmonis dan masuk akal.

Rangkaian proses penulisan ini dikerangkai oleh konsepsi Benedict Anderson (2008: 6–11) tentang bangsa atau nasion sebagai komunitas politis terbayang yang bersifat terbatas (garis-garis perbatasan pasti meski elastis), inheren, dan berkedaulatan. Proses “membayangkan” atau menganggap diri menunjukkan kondisi anggota bangsa yang sebenarnya tidak tahu, tidak mengenal, tidak bertatap muka, bahkan tidak pernah mendengar tentang sebagian besar anggota bangsanya yang lain.

Konsep lain yakni etnonasionalisme dari Hans van Miert difungsikan sebagai penjelas dan penelaah evidensi yang ditemukan dalam *Soeara Pakat*. Miert (2003: xviii–33) yang diilhami A.D. Smith<sup>31</sup> mengajukan etnonasionalisme sebagai nasion berdasar kesamaan etnis, kesatuan budaya, kesamaan masa lalu, dan kesamaan tentang suku dan agama. Perjuangan etnonasionalisme menurut Miert, berkaca dari Jawa, bertujuan untuk melahirkan kembali kecemerlangan budaya/politik yang khas dan menuju suatu nasion yang kuat merdeka dan dipimpin oleh bangsa sendiri sesuai dengan angan-angan politik dan sosial mereka. Gagasan etnonasionalisme sebagaimana nasionalisme lain ditandai oleh tuntutan pengakuan dan persamaan hak. Riset Miert di Jawa dan Sulawesi menunjukkan konsep nasional yang konkret dengan menekankan ciri etnis, budaya, dan kadang-kadang sosial efektif menghimpun anggota dalam jumlah besar.

Selebihnya, tulisan ini menyertakan berbagai konsep penjelas terkait etnisitas, gejala dominan yang mengemuka dalam *Soeara Pakat*. Konsep lain yang digunakan secara operasional dalam memaknai teks antara lain konsep identitas dan penguatan etnik (*ethnic self-empowerment*).

---

31 Nasion etnis (*ethnic-genealogical*) menurut Smith adalah kesatuan hukum, dengan hak dan kewajiban yang sama untuk seluruh warga (Miert, 2003: 33).

Thung dkk. (2004: 3–5) menyatakan bahwa identitas (etnik) bisa muncul ketika identitas grup lain mengemuka. Identitas akan memunculkan pertanyaan mengapa sebuah grup melihat diri mereka sendiri berbeda atau terpisah dari kelompok etnik lain; mengapa mereka melihat diri dalam ukuran dan lokasi fisik tertentu; mengapa melakukan aksi kolektif; mengapa identitas etnik digunakan untuk politik dan sebaliknya. Adapun penguatan etnik meliputi strategi, sasaran ekstensif dan integratif, dan negosiasi antara kepentingan kelompok dengan pemerintah dan kelompok lain.

## **A. PAKAT DAJAK DAN ORGANISASI PERGERAKAN DI KALIMANTAN SELATAN DAN TIMUR PADA AKHIR MASA KOLONIAL**

### **1. Perkembangan Pergerakan Kebangsaan**

Pakat Dajak (kemudian ditulis Pakat Dayak atau PD) tumbuh dalam situasi kolonial di wilayah Keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur yang berpusat di Banjarmasin. Pakat Dayak lahir pada 1938 ketika Pemerintah Kolonial Belanda semakin serius menata daerah koloni di luar Jawa (*buitenlanden*). Setelah kontrak pendek dilaksanakan secara simultan di wilayah *buitenlanden* dan diikuti dengan penetapan Undang-Undang Desentralisasi pada 1919, berbagai kebijakan terkait pengelolaan daerah dihasilkan, antara lain pembentukan kota (*gemeente/geweest*) dan pembentukan kelompok masyarakat (*groepgemeenschap*). Kelompok masyarakat Banjar ditetapkan pada 1937/1938<sup>32</sup> (Listiana, 2011: 151), tahun yang sama dengan perancangan dan pembentukan Komite Kesadaran Bangsa Dajak (kemudian ditulis Komite Kesadaran Bangsa Dayak atau KKBD), organisasi pendahulu PD.

*Groepgemeenschap* Banjarmasin meliputi daerah sebaran etnik di *Afdeeling*<sup>33</sup> Hulu Sungai dan *Afdeeling* Banjarmasin (kecuali *Onderafdeeling*<sup>34</sup> Pulo Laut, Tanah Bumbu), termasuk Kota Banjarmasin. Banjarmasin yang kala itu berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi

32 *Staatsblad* 1937 No. 464 dan *Staatsblad* 1938 No. 133.

33 *Afdeeling* yang dimaksud adalah unit administratif Pemerintah Kolonial setingkat di bawah keresidenan yang dipimpin oleh asisten residen.

34 *Onderafdeeling* yang dimaksud adalah unit administratif Pemerintah Kolonial setingkat di bawah *afdeeling* yang dipimpin oleh kontrolir atau *gezaghebber* (pejabat pemilik otoritas baik sipil maupun militer).

Keresidenan adalah tempat bertemunya berbagai kepentingan dan kelompok masyarakat (Listiana, 2011: 151; 148-149). Banjarmasin juga menjadi kota pusat pendidikan di Keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur. Penyelenggaraan pendidikan kelas ala Eropa dimulai sejak 1901 dengan berdirinya Sekolah Kelas Dua untuk menghasilkan tenaga kerja rendahan yang bisa membaca dan menulis. Menyusul kemudian berbagai jenis sekolah setingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan sekolah kejuruan seperti *Europeesche Lagere School* (ELS), *Hollandsch-Chineesche School* (HCS), *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), Sekolah Kelas Satu, Sekolah Rakyat (*Volkschool*), sekolah lanjutan (*Vervolgschool* ataupun *Schakelschool*), *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), dan sekolah keterampilan seperti sekolah pertukangan (*Ambachtsschool*). Sekolah-sekolah tersebut selain berbeda masa studi dan bahasa pengantarnya, juga berbeda sasaran dan peruntukannya. Ada sekolah yang dikhususkan bagi anak Eropa atau anak Tionghoa. Adapula sekolah untuk bumiputra dengan kategori berdasarkan kedudukan sosial dan ekonomi tertentu (Nawawi dkk., 1992/1993: 29–92).

Sekolah pemerintah yang terbatas di area pusat pemerintahan *afdeeling* atau *onderafdeeling* ditambah dengan kategori diskriminatif tampaknya berhubungan dengan maraknya pendirian madrasah<sup>35</sup> dan sejumlah sekolah partikelir,<sup>36</sup> terutama di luar kota, khususnya *Afdeeling* Hulu Sungai. Sekolah pemerintah yang terbatas sampai MULO (Nawawi dkk., 1992/1993: 29–92) juga menyebabkan para pelajar yang hendak melanjutkan sekolah harus ke luar Kalimantan, terutama ke Makassar dan Surabaya, dua daerah yang diketahui menghasilkan para aktivis organisasi pergerakan di Kalimantan Selatan dan Timur.

Sejumlah madrasah kemudian membentuk organisasi pergerakan, seperti Persatuan Perguruan Islam dan Musyawaratutthalibin. Sebaliknya, para santri madrasah ini membentuk organisasi dengan nama yang terkadang berafiliasi dengan daerah seperti Pemuda Marabahan dan Sarekat Kalimantan ataupun membangun cabang perhimpunan yang berpusat di Jawa seperti Sarekat Islam dan

35 Madrasah adalah salah satu bentuk penataan sistem pendidikan berupa pengajian yang diketahui mulai berdiri di Keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur saat memasuki tahun 1900. Hingga tahun 1960-an jumlah madrasah di wilayah itu sudah mencapai 125 lembaga (Nawawi, 1992/1993: 50-51). Besarnya jumlah madrasah (entah langsung atau tidak) tampaknya berhubungan dengan gerakan kebangkitan Islam sangat menonjol di Banjarmasin.

36 Sekolah partikelir didirikan oleh organisasi pergerakan yang berpusat di Jawa, yakni Taman Siswa, Parindra, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam (Nawawi, 1992/1993: 53; 62–66).

Nahdlatul Ulama (Wajidi, 2007; Syaharuddin, 2017). Aktivitas pergerakan para pemuda Muslim ini berlanjut hingga revolusi fisik dan upaya penyatuan menjadi Indonesia. Nasionalisme Islam melebur dengan nasionalisme Indonesia yang berujung pada pilihan menjadi orang Indonesia (Sjarifuddin, 1974; Syaharuddin, 2017).

Selain sekolah yang telah disebutkan, lebih dari setengah abad sebelumnya, tepatnya sejak 1835 Misionaris Barnstein dari Pekabaran *Rheinische Zendeling Genootschap* (RZG) mengadakan sekolah untuk anak-anak Ngaju di Sungai Apui, *Afdeeling* Kuala Kapuas. Sekolah Misi Barnstein berhasil membuat anak-anak Ngaju bisa membaca. Dalam kurun hampir 20 tahun, orang Ngaju yang bisa membaca diperkirakan sudah mencapai 500 orang seperti yang dilaporkan oleh Tamanggong Ambo (Mahin, 2005: 90; 110-111; Listiana, 2011: 213; 218). Terbilang awal mengenal pengajaran, anak-anak Ngaju dikenal tumbuh sebagai kelompok pionir penggugah kesadaran politik. Maka tidak mengherankan, jika penggagas Pakat Dayak adalah anak muda Ngaju. Di antara penggagas ini adalah para pelajar yang melanjutkan studi di Makassar dan Surabaya.

## **2. Pakat Dayak dan Soeara Pakat**

Pakat Dayak adalah organisasi penerus Sarekat Dayak dan Komite Kesadaran Bangsa Dayak. Cita-cita dan tuntutan-tuntutan SD dan KKBD berlanjut dan berkembang dalam wadah organisasi PD (Riwut, 1958: 176). *Soeara Pakat* menunjukkan bahwa PD “menggambil over pekerdjaan Centraal Comite Kesedaran Bangsa Dajak menoen-toet kedoedoekan dalam Dewan Rakjat.” Tuntutan lain adalah “meminta kepada Pemerintah soepaja di daerah tanah Dajak ditempatkan Ambtenaar Boemipoetera jang terdiri dari bangsa Dajak.” Tuntutan terakhir itu disertai dengan permintaan untuk menyekolahkan para pemuda Dayak di sekolah-sekolah pamong praja (SP, Februari 1940: 2). Menjelang akhir Pemerintahan Hindia Belanda, Pakat Dayak diketahui masih meminta agar urusan pemerintahan di daerah Dayak dipimpin oleh putra Dayak kepada Commissie Visman. Cita-cita ini kembali diajukan kepada Pemerintahan Militer Jepang dan ditolak (Ideham dkk. 2003: 314).

Sarekat Dayak adalah organisasi yang didirikan pada 1918/1919 oleh para intelektual Dayak di Banjarmasin (Sjarifuddin, 1974: 48;

Usop, 1994: 18; Davidson, 2002: 93). Pendirian SD dalam historiografi setempat lebih dicitrakan sebagai organisasi yang bertujuan untuk memberi kesadaran masyarakat Dayak akan pendidikan Barat dan kesepakatan di antara mereka (Bondan, 1953: 83-84; Sjarifuddin, 1974: 48; Asnaini, 2011). Citra tersebut pun tepat terlebih dilihat dari praktik pendirian *Dajaksche School*, sekolah partikelir untuk orang-orang Dayak di Kuala Kapuas (*De Indische Courant* No. 42, 3 November 1925: 5) yang sudah dibangun sejak 1924 (Klinken, 2007: 9). Citra lain PD dalam kepemimpinan Hausman Baboe adalah sebagai organisasi yang aktif mempropagandakan persoalan kemanusiaan bersama Sarekat Islam (SI) juga diperoleh dari koran-koran berskop Hindia Belanda berikut.

SD diberitakan kerap mengadakan pertemuan bersama dengan anggota SI. Salah satu pertemuan yang “melegenda” adalah *Nationaal Borneo Conferentie*. Selain itu, SD diketahui juga pernah mengadakan pertemuan bersama dengan sejumlah cabang SI dan organisasi lain baik yang bergerak dalam label keagamaan seperti Al Ittihad maupun organisasi ekonomi seperti koperasi ataupun organisasi sosial seperti *societet*. Dalam pemberitaan koran, *Nationaal Borneo Conferentie* yang pertama kali diadakan pada 1923 meski membicarakan perhimpunan yang berasaskan keagamaan, juga membicarakan kehidupan bersama tanpa perbedaan ras dan politik (*Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers* No. 17, 1923: 171)<sup>37</sup>. Forum tersebut juga diberitakan bertujuan membangun kecintaan terhadap tanah dan manusia Kalimantan dan berjuang untuk kebebasan (*vrijheid*) dengan cara yang tepat; membangun kesadaran akan potensi (apa yang dimiliki) dan sadar akan perkembangan dunia. Konferensi juga diberitakan dilakukan atas nama persatuan rakyat untuk mencapai persatuan umat manusia. Penduduk Kalimantan yang beragam terdiri atas Islam, Kristen, dan *heiden* (kepercayaan masyarakat setempat) disebut sebagai alasan untuk harus bekerja sama (*Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers* No. 14, 1924: 46-47)<sup>38</sup>. Pertemuan SD dengan SI pada waktu-waktu selanjutnya diberitakan *De Indische Courant* membicarakan materi diskusi yang berkonten khas organisasi sosialis, seperti propaganda penolakan modal asing yang dikatakan hanya akan

37 Informasi tersebut merupakan sari berita yang diambil dari koran *Pewartu Deli* April 1923 berjudul “S.I. Bandjarmasin (Borneo)”.

38 Informasi tersebut merupakan sari berita yang diambil dari koran *Persatoean* Maret 1924.

memunculkan proletariat dan menyebabkan kehidupan masyarakat semakin memburuk (*De Indische Courant* No. 42, 3 November 1925: 5).

Pertemuan dan kedekatan SD dengan SI yang dapat disimpulkan dari pemberitaan tersebut diinisiasi oleh Hausman Baboe, pemimpin SD kala itu. Hausman Baboe disinyalir sebagai simpatisan SI, sebagaimana laporan Residen Kalimantan Selatan dan Timur pada 1921 yang disampaikan dalam riset Klinken, dengan memberi dukungan secara diam-diam dalam aksi protes anti-pemerintah yang dilancarkan oleh salah seorang anggota SI di Sampit. Lebih lanjut, khususnya terkait dengan propaganda anti-modal asing yang disampaikan oleh Hausman Baboe, dikabarkan karena pengaruh infiltrasi ideologi sosialis<sup>39</sup> melalui jejaring Sarekat Rakyat (SR) dalam SI<sup>40</sup>. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan kepada khususnya anggota SD adalah pesan untuk kehidupan masyarakat setempat tetapi dibungkus oleh pemikiran sosialis. SD dan SI juga karena anggota SD ada yang beragama Islam<sup>41</sup> dan istri kedua Baboe adalah orang Banjar Islam yang menunjukkan keterbukaannya dalam berinteraksi (*De Indische Courant* No. 42, 3 November 1925: 5; Klinken, 2007: 8; 10-12; SP, 1940).

Pendirian SD dapat pula dinyatakan dipicu atau yang disebut Davidson (2002: 93) sebagai respons atas perkembangan Sarekat Islam (SI) di Banjarmasin. Sejalan dengan Davidson, Klinken (2007) berpendapat bahwa SD adalah produk situasi sosial-politik atau gejala perkotaan yang dihasilkan oleh sekelompok intelektual Dayak perkotaan<sup>42</sup>. Pengurus pusat Pakat Dayak bertempat di Banjarmasin menunjukkan pertemuan ide perhimpunan Dayak ini dikembangkan

39 Dalam *Bintang Borneo*, sebagaimana kutipan Klinken (2007: 11), juga diberitakan bahwa materi Hausman Baboe dalam pertemuan bersama SD dan SI tahun 1925 memuat isu emansipasi atas status perempuan, hak atas tanah, dan tenaga kerja (buruh). Dalam mewujudkan itu, Baboe menyatakan penduduk asli (Dayak) harus bergabung dengan masyarakat di luar kelompoknya yakni kelompok Islam. Baboe menganjurkan agar masyarakat setempat meningkatkan penanaman konsumsi harian seperti sayur dan buah ketimbang karet (tanaman industri). Baboe juga menyampaikan tuntutan penghapusan pajak menyembelih hewan. Atas materi-materi tersebut, *Bintang Borneo* memberi tajuk "Komunis Bekerja di Koeala Kapoeas" untuk berita tentang Baboe ini.

40 Jejaring Sarekat Islam Hausman Baboe yang kerap disebut dalam koran adalah Maharadja (*De Indische Courant*) dan H. Kanoen (SP, 1940) yang keduanya adalah orang Minang, aktivis Jong Sumatranen Bond (Miert, 2003: 82; 545).

41 Pengumuman tentang keluarnya H. Kanoen dari Pakat Dayak karena aturan disiplin partai diumumkan secara khusus dalam sebuah kolom di SP.

42 Kelompok tersebut juga diistilahkan dengan komunitas kosmopolitan. Di Indonesia masa kolonial, pasifikasi dan modernisasi kolonial memunculkan gejala umum berupa pembentukan berbagai organisasi pergerakan pemuda.

di Banjarmasin, tempat di mana putra-putra Dayak melanjutkan studi mereka (SP, Maret 1940: 4). Adapun situasi sosial politik yang dimaksud berupa pasifikasi, modernisasi kolonial serta Misi Kristen dan kehadiran organisasi pergerakan pemuda seperti SI. Keterkaitan pendirian SD dengan SI juga ditunjukkan oleh penggunaan kata “sarekat” sama dengan Sarekat Islam, dan nota protes Hausman Baboe yang turut diajukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda atas pelarangan kedatangan H.O.S. Cokroaminoto pada *Nationaal Borneo Conferentie*.

SD diketahui masih bertahan sekitar tahun 1926, waktu yang dalam sejumlah tulisan sejarah disebut terjadi perubahan kata “sarekat” diganti menjadi “pakat” pada 1926<sup>43</sup> (Usop, 1994: 18; 55; Davidson, 2002: 93; Tanasaldy, 2012: 31). Versi lain yang bersumber dari laporan J. Eisenberger, kontrolir Banjarmasin-Marabahan, sebagaimana yang dikutip Syaharuddin (2017: 70) menyebut bahwa aktivitas Sarekat Dayak menurun pada 1927–1930-an seiring dengan mundurnya Hausman Baboe sebagai pemimpin organisasi.

Periode ketika SD disebut berhenti beraktivitas, vakum, maupun berganti nama tersebut bersamaan dengan masa penangkapan dan pengasingan para aktivis nasionalis militan terutama yang diduga berideologi sosialis-komunis oleh pemerintah HB ke Boven Digul. Meski belum dapat dipastikan motif penghapusan kata “sarekat” pada SD, kasus-kasus penangkapan aktivis di Kalimantan termasuk di Banjarmasin yang sebagian besar berafiliasi dengan Sarekat Rakyat sebagaimana terjadi pada redaksi<sup>44</sup> *Soeara Borneo*, koran pimpinan Hausman Baboe, tampaknya bukan kebetulan, melainkan memang berkaitan. Dugaan ini diperkuat oleh munculnya wacana retradisionalisasi sebagai salah satu program politik kolonial pasca-

43 Informasi yang menyatakan bahwa PD dibentuk pada 1926 kemungkinan besar sebenarnya mengacu pada pendirian Pakat Guru Dayak. Informasi inilah yang kemungkinan merancukan pemahaman tentang pendirian Pakat Dayak. Kerancuan terlihat pada pendapat Usop (1994: 55) tentang pergantian nama Sarekat Dayak menjadi Pakat Dayak pada 1926. Sementara itu, Klinken (2007: 10) dan Lambut lebih menilai Pakat Guru Dayak sebagai pemberi inspirasi dalam pembentukan Pakat Dayak. Aktivitas pendidikan memang merupakan salah satu program kerja yang dijalankan Pakat Dayak namun berdasarkan gagasan yang mengemuka dalam *Soeara Pakat* diketahui bahwa pendidikan bukanlah tujuan Pakat Dayak.

44 Pengaruh Sarekat Rakyat ditunjukkan olehuduknya Achmad alias Maharadja Lela, salah seorang anggota Sarekat Rakyat dari Jawa yang sedang diasingkan Pemerintah Kolonial di Kalimantan, sebagai redaksi surat kabar *Soeara Borneo* yang dipimpin oleh Housman Baboe. Baboe bahkan diberitakan menyatakan keinginannya untuk berkooperasi dengan Sarekat Rakyat (Klinken, 2007: 11).



penangkapan aktivis antara 1926–1927 (Klinken, 2007: 14) yang berujung pada dorongan pemunculan penguatan identitas kesatuan etnik Dayak.

SD sebenarnya baru bertransformasi menjadi Pakat Dayak pada 20 Agustus 1938 setelah didahului oleh pembentukan Komite Kesadaran Bangsa Dayak<sup>45</sup>(KKBD) (Riwut, 1958: 176–178; SP, Februari 1940: 2). Politik etnik kemudian dilancarkan para pejabat Pemerintah Kolonial melalui materi tentang kesatuan etnik dengan karakteristik tertentu, wilayah hunian tertentu untuk kesatuan etnik<sup>46</sup>, dan perwakilan etnik di Dewan Rakyat (Volksraad) Hindia Belanda (Klinken, 2011: 166–167).

Materi terakhir tersebut yang paling dulu mengemuka dalam kelahiran Pakat Dayak dalam bentuk pendirian KKBD. Komite yang dipimpin oleh Mahir Mahar, keponakan Hausman Baboe lulusan *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA)<sup>47</sup> yang kemudian menjadi pemimpin pertama Pakat Dayak. Komite menuntut perwakilan orang Dayak di Volksraad karena perwakilan Kalimantan selama ini dianggap tidak menyuarakan keinginan orang Dayak (Riwut, 2007: 166–167). Sayangnya, pengajuan perwakilan Dayak gagal.<sup>48</sup> Kegagalan inilah yang menguatkan pembentukan Pakat Dayak (PD) dengan penyelenggaraan konferensi pertama organisasi pada 23–26 Desember 1939 (Soeara Pakat, Februari 1940: 6).

Maksud dan tujuan pendirian Pakat Dayak berdasarkan anggaran dasarnya disampaikan Tjilik Riwut (1958: 175–178) dalam tulisannya *Kalimantan Memanggil*. Riwut menyatakan PD “... berdasar pada persatuan suku Dayak dengan mengindahkan persamaan hak dan kewajiban.” Persatuan yang dimaksud adalah “... penggabungan seluruh suku Dayak sehingga merupakan satu golongan yang besar dan teratur.” Adapun tujuan pendirian PD yaitu “mengejar ketinggalan derajat suku, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi; persatuan

45 ‘Comite Kesedaran Bangsa Dajak’ adalah nama yang dimuat dalam *Soeara Pakat*. Adapun perubahan menjadi Komite Kesadaran Suku Dajak oleh Tjilik Riwut dalam *Kalimantan Memanggil* kemungkinan besar karena disesuaikan dengan kelaziman pada masa penulisan buku itu.

46 Baca tulisan Tjilik Riwut berjudul *Kalimantan Memanggil* (1958), halaman 238 dan bandingkan dengan analisa Klinken dalam “Dayak Ethnogenesis and Conservative Politics in Indonesia’s Outer Islands” (2011), h. 167.

47 Wawancara Prof. M.P. Lambut, Ems. di Banjarmasin, pada 6 Agustus 2019, pukul 10.00–12.00 WIT.

48 Kegagalan pengajuan perwakilan Dayak dinilai sebagai kekalahan bersaing terhadap kelompok Banjar. Dengan demikian, rivalitas dengan Banjar pun muncul sebagaimana yang diharapkan Pemerintah Kolonial (Brown, 2009: 108).

seluruh suku Dayak; mengejar segala hak-hak yang diakui oleh hukum negara; dan mempertinggi kembali adat leluhur serta kebudayaan suku.”

Riwut menegaskan bahwa siapa pun yang mengakui diri sebagai orang Dayak, apa pun agamanya, akan diterima sebagai anggota PD. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa PD adalah perhimpunan yang tidak mencampuri urusan agama (Riwut, 1958: 177).



Gambar dari octoesan - octoesan Tjambang Pakat Dajak diseloeroeh Kalimantan waktoe Conferentie jang pertama kali di Bandjermasin pada tanggal 23 sampai 26 December 1939 j. b. l. antara mana jang pakei X 1. sdr. C. Loeran Secretaris oemoem H. B. 2. ditengah doedoek sdr. M. Mahar Voorzitter H. B. 3. sdr E. S. Handoeran plv. Voorzitter H. B. dan 4. doedoek Toean H. Baboe Adviseur H. B.

Gambar 11 Anggota Pakat Dayak pada konferensi pertama di Banjarmasin pada 23–26 Desember 1939.  
(Soeara Pakat, Juni 1940: 7)

Konferensi Pakat Dajak I di Bandjermasin telah dihadiri oleh 14 cabang<sup>49</sup> Pakat Dayak. Dalam konferensi ditetapkan susunan pengurus pusat dan cabang, badan kerja, dan program kerja organisasi. Pengurus Pusat Pakat Dajak terdiri atas Mahir Mahar sebagai ketua, E.S. Handoeran<sup>50</sup> sebagai wakil ketua, D.

49 Pakat Dayak pada 1940 mengklaim telah mendirikan 16 cabang dengan ratusan anggota (SP, Maret 1940: 5).

50 E.S. Handoeran kerap memberi pernyataan resmi dari perhimpunan. Selanjutnya, Handoeran masih aktif sebagai sekretaris gerakan pemuda nasionalis bernama Partai Persatuan Rakyat

Loeran sebagai sekretaris umum, B. Pahoe dan C. Rupock sebagai sekretaris I dan II, Frits Mathias sebagai bendahara, Edward Mahar sebagai ketua bagian Ekonomi, Doeradjat di bagian Documentatie Bureau, dan F.J. Mathias bagian percetakan yang dibantu oleh M. Djala dan Nyonya Mathias untuk penerbitan surat kabar, dan H. Satta mengurus pembukuan. Konferensi juga mengangkat G. Obus sebagai konsul di Surabaya, dan Hausman Baboe serta S. Anggen sebagai penasihat (SP, Februari 1940: 1–7).

Konferensi I tersebut juga menghasilkan tiga rekomendasi yang mencerminkan prioritas pendirian PD. Setiap rekomendasi ditujukan kepada pihak tertentu yang dapat menjadi petunjuk bagi kita untuk melihat relasi PD kala itu. Pertama, permohonan pendirian mata pelajaran pertanian pada sekolah lanjutan (*vervolg-school*) di tanah Dayak<sup>51</sup>. Rekomendasi ini ditujukan kepada Pengawas Sekolah Misi Bazel di Banjarmasin dan Pemerintah Hindia Belanda di Banjarmasin. Kedua, atas dasar pungutan cukai di tanah Dayak (dalam uraian sebelumnya disebut *Afdeeling Kapoeas Barito*), PD mengajukan permohonan agar uang hasil pungutan disalurkan ke dana beasiswa (*studiefonds*) PD atau langsung disalurkan kepada para pelajar Dayak dari daerah itu. Rekomendasi kedua “dipersembahkan” kepada Pemerintah Hindia Belanda, khususnya kepada kepala-kepala daerah (asisten residen) Kapuas-Barito di Banjarmasin dan (kontrolir) di Kuala Kapuas, Sampit, Muara Teweh, Puruh Cahu, dan Kuala Kurun. Pemilihan kata “dipersembahkan” menunjukkan sifat kooperatif PD. Rekomendasi kedua ini juga ditujukan kepada pers yang juga menunjukkan kesadaran anggota PD akan pentingnya publikasi, khususnya terkait pelajar Dayak yang berdomisili di wilayah lain. Ketiga, pengusulan pembentukan Dewan Adat yang berbicara tentang hukum adat (*inheemsche rechtspraak*) untuk seluruh tanah Dayak dan diketuai oleh bangsa Dayak sendiri. Pengajuan ini dilengkapi pertimbangan bahwa dewan serupa cocok dan telah berlaku di tanah Dayak. Rekomendasi ini juga diajukan kepada jajaran Pemerintah

---

Indonesia (PRI) yang mengampanyakan kemerdekaan Indonesia. Yang menarik, anggota PRI terdiri atas golongan dan asal daerah seperti Pangeran Musa, Aidan Sinaga, Amir Hasan Bondan, dan Dokter Soeranto (Ideham dkk. 2003: 407).

51 PD sudah menggunakan istilah Tanah Dayak yang menunjukkan paling tidak pemahaman akan area atau wilayah tertentu bagi orang Dayak atau yang disebut dengan “*Dajak Reseravaat*” gagasan Pemerintah Hindia Belanda (seperti yang disampaikan oleh Tjilik Riwut dalam *Kalimantan Memanggil*) sudah dipahami atau mungkin bahkan disosialisasikan dalam Konferensi I PD tersebut.

Kolonial setempat, namun kali ini ini daftar tujuan ditambah untuk kepala daerah Tanjung dan Banjarmasin (SP, Februari 1940: 6).

Rekomendasi terakhir tersebut berkait dengan hasil KKBD setahun sebelum Konferensi I berupa pengajuan wakil Dayak dalam Dewan Rakyat (Volksraad).<sup>52</sup> Pengajuan yang gagal ini meyakinkan kelompok Dayak tersebut akan pentingnya kekuatan suara bersama agar dapat didengar oleh Pemerintah. Usaha untuk menghimpun suara kelompok diwujudkan dengan pembentukan Pakat Dayak (Brown, 2009: 108) dan pembentukan *Soeara Pakat* sebagai organ propaganda. Oleh karena itu, membaca kembali *Soeara Pakat* adalah salah satu upaya memahami dialog pada masa awal “kebangkitan adat”.



Gambar 12 Tampilan umum halaman pertama *Soeara Pakat* yang memuat simbol dan moto PD. (*Soeara Pakat*, April dan Mei 1940)

52 Tjilik Riwut (1958: 176) menyampaikan bahwa Komite Kesedaran Suku Dayak yang dibentuk terutama untuk menuntut hak kedudukan dalam Sidang Dewan Rakyat (Volksraad) serta untuk membangunkan perhatian suku Dayak seumumnya (mungkin maksudnya seluruhnya) terhadap nasib tanah airnya.

Konten rekomendasi ini pula yang kerap dinilai oleh para peneliti, seperti Klinken dan Brown dkk., sebagai reaksi atas pembentukan Dewan Banjar yang pembentukannya juga menjadi bagian dari politik etnik kolonial.

*Soeara Pakat* (SP) terbit kali pertama pada tahun 1939. SP diterbitkan sebulan sekali oleh Dewan Redaksi di bagian Pers Propaganda dan Documentatie yang berkantor di Wilhemina Weg (kini, Jalan Jenderal Sudirman), area di pusat pemerintahan kolonial dan pusat ekonomi Kota Banjarmasin. Sejak Mei 1940 penerbitan SP dipimpin oleh Tjilik Riwut yang bertugas sebagai Penanggung Jawab Redaktur di Purwakarta, kota tempatnya studi. Sebagai media publikasi organisasi, SP dijual dengan harga yang lebih murah untuk anggota Pakat Dayak (SP, Januari 1940–Maret 1941). Keterlibatan Riwut dalam *Soeara Pakat* memberi spektrum warna tersendiri karena ia tumbuh dalam pengaruh nasionalisme Indonesia di Jakarta (Laksono dkk. 2006: 87–106).<sup>53</sup>

Dalam setiap terbitan SP dimuat moto PD “Pimpinlah bangsa kita kepada persatoean, karena bersatoe kita tegoeh bertjerai kita djatoeh”. Selain moto, pada halaman pertama SP selalu dimuat simbol PD berupa *talawang* (perisai) bersilang *mandau* dan *sipet* (sumpit). Simbol tersebut menurut Riwut (Juni 1940: 3–4) merupakan 3 perkakas senjata nenek moyang Dayak yang dikenal sejak zaman dulu hingga kini. Ketiganya merupakan sebuah kesatuan. *Mandau* yang terbuat dari besi teratur, rapi, dan tajam melambangkan pikiran jika diolah akan menjadikan manusia berilmu. *Mandau* juga begitu keras yang melambangkan kemauan anggota PD dalam mengejar ilmu dan kemajuan. *Perisai* terbuat dari kayu teratur dan rapi berfungsi sebagai penghalang segala hal yang hendak merusak. *Perisai* melambangkan usaha penjagaan anggota PD terhadap segala perusak sehingga dapat terus berjuang dalam usaha pertanian (ekonomi). *Sumpit* berfungsi untuk membidik burung atau apa pun yang dikehendaki, termasuk kehidupan sosial. Dengan demikian, persatuan ketiga senjata tersebut membuat anggota PD dapat mencapai ilmu, ekonomi, dan sosial.

Melalui SP, tujuan dan cita-cita PD dalam pemahaman kontributor yang umumnya adalah pembaca SP juga dapat diketahui. Tujuan PD yang mengemuka dalam artikel-artikel baik redaksi maupun kontributor yang dimuat dalam SP antara lain “Mempertinggikan deradjat bangsa, bahkan oentoe kessedjahteraan anak tjoetjoe kita dihari kemoedian” (D. Inso-Pepas, Januari 1940: 1). Artikel lain berjudul “Tjita-Tjita”

53 Tjilik Riwut melanjutkan sekolah perawat di Banyu Asih, Purwakarta pada tahun 1930-an. Setelah sekolah perawat, Riwut tetap tinggal di Purwakarta dan beraktivitas di wilayah sekitarnya. Riwut sempat bekerja sebagai pengantar koran yang mengantar ketertarikan dan pencarian ilmu di bidang jurnalistik sekaligus ideologi dengan M. Tabrani dan Sanusi Pane (Laksono dkk. 2006: 89-91).

menyebut bahwa PD “berdiri boeat mempersatoekan Indonesir Dajak, mengangkat deradjat, martabat dan hakekat Indonesir Dajak, atau mengambil tindakan akan menjama hak Indonesir Dajak terhadap noesa dan bangsa lain sekelilingnja” (Onos, Juni 1940: 10–12).

Selain tujuan, artikel terkait organisasi mengemukakan cita-cita organisasi. Dalam artikel berjudul “Apakah Arti Kewadajiban” dinyatakan bahwa PD adalah “daja oepaja oentoek menoentoet kemadjoean dan tjita-tjita oentoek mentjapai kedoedoean bangsa kita jang dipandang oleh mata doenia amat rendah” (Pendjajah, Juni 1940: 8–10).

Kedua tema tersebut termasuk dalam kolom “Roeangan Organisatie”. Selain kolom tersebut, terbitan SP memuat “Roeangan Economie”, “Roeangan Onderwijs”, “Berita Pengoeroes Poesat dan Tjabang”, “Roeangan Kepoetrian”, “Roeangan Riwayat” yang berhubungan dengan adat istiadat Dayak<sup>54</sup>, “Seroean” untuk propaganda, “Correspondentie”, “Ma’loemat”, “Kabar Kaloenen”, dan “Kabar Baris Bawi”(SP, Februari 1940: 2; 7). Penamaan kolom-kolom tersebut kerap berubah atau tanpa judul kolom sama sekali, namun konten yang disuguhkan berkategori sama. Selain kolom yang diisi oleh redaksi, SP juga memberi ruang bagi artikel para anggota PD.

Kolom berita maupun artikel SP dimuat dalam bahasa Melayu, Ngaju, dan sesekali Maanyan. Komposisi penggunaan bahasa dalam setiap edisi tidak sama. Pada dua edisi pertama tahun 1940 bahasa Ngaju mendapat porsi lebih besar ketimbang edisi setelahnya.<sup>55</sup> Adapun kolom yang selalu menggunakan bahasa Ngaju adalah “Kabar Baris Bawi” yang memuat informasi atau isu-isu tentang perempuan atau keluarga dan “Kabar Kaloenen” yang memuat informasi tentang keadaan yang sedang terjadi di daerah ataupun di daerah lain. Penggunaan bahasa Ngaju dan (sangat sedikit) Maanyan besar kemungkinan disesuaikan dengan area sebaran SP. Bahasa Ngaju untuk daerah di aliran Sungai

54 Redaksi *Soeara Pakat* menggunakan istilah “bangsa kita” untuk kata “Dayak” yang digunakan penulis.

55 Edisi No. 1/Th. 1940 memuat 5 artikel berbahasa Melayu, 7 bahasa Ngaju, dan 1 bahasa Maanyan. Edisi No. 2/Th. 1940 memuat 7 artikel berbahasa Melayu dan 4 bahasa Ngaju. Edisi No. 3/1940 memuat 10 artikel berbahasa Melayu dan 2 bahasa Ngaju. Edisi No. 4/1940 memuat 13 artikel berbahasa Melayu dan 7 berbahasa Ngaju. Edisi No. 4–5/1940 memuat 13 artikel berbahasa Melayu, 7 artikel berbahasa Ngaju, dan 1 berbahasa Maanyan. No. 6/1940 memuat 19 artikel berbahasa Melayu dan 1 artikel berbahasa Ngaju. Edisi No. 8/1940 memuat 18 artikel berbahasa Melayu, 6 berbahasa Ngaju, dan 1 berbahasa Maanyan. Edisi No. 3/1941 memuat 15 artikel berbahasa Melayu dan 4 berbahasa Ngaju.

Kapuas dan Kahayan meliputi Kuala Kapuas, Banjarmasin, Mandomai, Kuala Kurun, Tamiang Layang, Tewah, dan Pangkoh (Riwut, 1959: 220). Bahasa Maanyan untuk daerah Barito dan Dusun Timur (SP, April dan Mei: halaman muka). Akan tetapi, jika dilihat dari komposisi penggunaan bahasa Melayu yang lebih besar, maka menunjukkan sasaran pembaca terbesar adalah komunitas Dayak di luar komunitas Ngaju maupun di luar Dayak. Sebaran SP di luar daerah tersebut ada di Purwakarta dan Karawang, tempat Tjilik Riwut studi dan di Surabaya, tempat G. Obus bermukim. Kedua daerah tersebut kemudian juga menjadi dua daerah cabang Pakat Dayak di Jawa.

Seluruh artikel atau konten (termasuk puisi, pengumuman, dan informasi lain) mulanya dianalisis isi untuk dapat ditentukan dalam telaah lanjutan. Penentuan artikel berdasar pada perumusan masalah yang telah diajukan pada bagian “Pendahuluan” yakni isu tentang persatuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, isu persatuan dipilih mengacu pada nama surat kabar yakni *Soeara Pakat* yang berarti suara persatuan (SP, Januari 1940: 6) dan moto yang selalu ditampilkan dalam halaman muka, yakni “Pimpinlah bangsa kita kepada persatoean, karena bersatoe kita tegoeh, bertjerai kita djatoeh” (SP, 1940). Berdasarkan analisis isi terhadap edisi nomor 1–6 dan 8 tahun 1940 serta nomor 3 tahun 1941, gagasan persatuan dalam SP dapat dibagi dalam tiga kategori yang berhubungan dengan identifikasi (konsep dan identitas) Dayak, penguatan dan persatuan Dayak, dan persatuan bangsa. Ketiga kategori ini mengerangkai pembahasan selanjutnya.

---

## **B. IMPIAN PERSATUAN BANGSA**

### **1. Identifikasi Diri**

“Sulit mendefinisikan apa yang dinamakan suku bangsa dalam konteks Dayak,” demikian pernyataan Singarimbun (2013: 140) saat mengklasifikasi kelompok etnik Dayak. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa yang disebut etnik Dayak itu mungkin dua kelompok tertentu yang mempunyai kesamaan bahasa tetapi adat istiadat mereka berbeda, begitu pula sebaliknya.

Jangankan definisi, intelektual Ngaju asal Kuala Kapuas, M.P. Lambut menyatakan bahwa tidak ada satu pun masyarakat di Kalimantan yang secara tradisional menyebut dirinya sebagai orang

Dayak. Bahkan, ia menekankan bahwa tidak ada satu pun bahasa di Kalimantan yang memiliki kosakata “Dayak” (Wawancara, 6 Agustus 2019).

Orang Kalimantan mengidentifikasi diri dari sungai atau tempat tinggal. Ada pula yang memakai nama pemberian dari kelompok lain (eksonim), seperti Ngaju/Biaju yang berarti orang dari udik (lawan kata *ngawak/hilir*) atau Ot Danum yang berarti hulu air. Dengan demikian, Dayak adalah jalan singkat atau istilah generik dari orang di luar kelompoknya (Singarimbun, 2013: 140; Ave dan King, 1986: 9; Klinken, 2011: 166; Wawancara Lambut). Persamaan definisi Dayak yang disampaikan oleh Singarimbun, Ave dan King, Klinken, dan Lambut terbatas pada sumber nama saja. Selibhnya, keempatnya memberi tambahan penjelasan yang berbeda. Ave dan King (1986: 9) menambahkan penjelasan tentang Dayak sebagai penduduk “asli” Kalimantan yang terdiri atas ratusan masyarakat adat berbeda bahasa, kesenian, pakaian, arsitektur rumah, dan sejumlah elemen budaya sebagaimana organisasi sosial. Klinken (2011: 166) menambahkan penjelasan tentang Dayak sebagai istilah para antropolog Barat untuk penduduk “asli” Kalimantan non-Muslim. Lambut (2019), mengikuti definisi Niewenhuis, menambahkan penjelasan tentang Dayak sebagai penduduk Kalimantan yang bukan Melayu. Singarimbun (2013: 149–150) masih bertahan tentang kerumitan dalam memastikan batasan etnik Dayak, kecuali ciri khas kelompok yang masih atau dulu berkepercayaan (umumnya disebut) Kaharingan dan memiliki tradisi bertani dengan ladang berpindah.

Diskusi untuk memahami diri dan memaknai Dayak selalu ada dalam setiap edisi *Soeara Pakat*, setidaknya demikian yang teridentifikasi dalam nomor 1–6 dan 8 terbitan 1940. Materi yang disuguhkan dalam format dialog dengan pembaca ataupun artikel tanggapan menunjukkan bahwa identitas Dayak sedang dibangun kala itu.

Kolom “*Lezing*” (pelajaran) berjudul “t. Hausman Baboe tentang Hoekoem Adat Dajak Loehoer dalam Conferentie Pakat Dajak jang pertama di Bandjermasin pada boelan December 1939” mengajak pembaca untuk memikirkan identitas Dayak. Hausman memulai dengan pertanyaan “Apakah Bangsa Dajak di Kalimantan memang soenggoeh2 ada mempoenjai Bangsa”; “siapa adanja bangsa jang asal



berdoedoek di Kalimantan?"; dan "Apakah dapat diberi keterangan jang jelas terhadap bangsa asal jang berkedoedoekan di Kalimantan itoe?" pertanyaan tersebut dijawab "Bangsa Dajak adalah bangsa jang tertoea pendoedoek soekoe-soekoe bangsa jang sekarang ada di Kalimantan" (Baboe, Februari 1940: 3–4).

Serupa Baboe, Tjilik Riwut (Juni 1940: 10–12) dalam "Indonesier Dajak Kalimantan"<sup>56</sup> juga mendialogkan definisi dan identitas Dayak dengan pembaca. Tiga pertanyaan diajukan Riwut, yaitu "Apakah itoe Dajak?"; "Apakah artinja itoe perkataan Dajak?"; dan "Dari manakah asal-timboelnja perkataan Dajak?"

Jawaban pertama, Dayak adalah yang mendiami Kalimantan. Selanjutnya, Riwut mengklarifikasi bahwa nama Dayak dinyatakan bukan nama asli, melainkan diberikan oleh pihak lain. Meskipun demikian, ia mengimbau "bangsakoe poetra dan poetri Kalimantan terimalah dengan senang hati. Biarpoen itoe nama jang membawa perihal jang ta sedap bagimoe."

Jawaban kedua, sebutan Dayak oleh sebagian orang dimaknai *aap* atau *kera*, orang utan, orang liar, dan makna lain yang tidak manusiawi. Riwut menambahkan bahwa informasi tentang Dayak khususnya yang diterima di Jawa sangat aneh, jelek, dan tidak masuk akal. Selanjutnya, Riwut yang bersekolah di Jawa melontarkan beragam contoh stigma negatif tentang Dayak bernada provokatif seperti berikut.

---

"Kita mendengar dengan koeping sendiri, orang bilang begini: Pada oemoemnja manoesia itoe memang selaloe mentjari kesenangan, biarpoen bangsa Dajak jang tinggal berbaring (menggoeler) sebagai babi di bawah semak-semak dan diroempoet-roempoet di hoetan, itoe poen taoe mentjari kesenangan keselamatan hidoep, apa lagi jang sebagai kita ini.

... Aneh lagi, orang bilang: orang Dajak makan orang... Apa orang Dajak makan nasi djoega???

... Maka terang dan njata, bahwa roepanja segala sesoeatoe jang djahat, segala sesoeatoe jang djelek jang tidak baik, jang hina, rendah: Dajaklah jang poenja..."

Jawaban ketiga, diakui Riwut tidak diketahui dan justru pembaca dimintai tanggapan agar nama pemberian itu dapat diketahui putra-putri Kalimantan. Pembahasan ini pun diakhiri dengan kalimat

---

<sup>56</sup> Yang menarik, dalam artikel ini Riwut menyebut bangsa Dayak secara bergantian dengan istilah "Indonesier Dajak". Penyebutan "Indonesier Dajak" sudah digunakan oleh Tjilik setidaknya sejak dalam terbitan No. 1/ 1940.

penguatan bahwa kebohongan tidak akan tersembunyi lagi dari rakyat di seluruh Indonesia dengan “menyerahkan nasib bangsa kita kepada oesaha dan tenaga kita jang bersama-sama di Pakat Dajak.”

Artikel di atas menunjukkan bahwa penulis ingin menyatakan bahwa mulanya mereka pun tidak paham apa itu Dayak. Bedanya, Baboe langsung menjawab dengan kalimat penguatan bahwa Dayak adalah penduduk tertua Kalimantan sedangkan Riwut lebih persuasif mendekati pembaca untuk meniti alur terjadinya Dayak. Riwut menunjukkan pemahaman akan rasa tidak nyamannya disebut Dayak karena Dayak kala itu berdefinisi sebagai “hinaan” sehingga ketika orang atau sekelompok orang disebut Dayak maka berarti mereka dipanggil sebagai “orang terhina”. Dengan demikian, Riwut ingin menyatakan bahwa “keterhinaan” yang dirasakan bersama tersebut adalah “identitas” kebersamaan mereka, yang membedakan mereka dari kelompok lain. Apa yang disampaikan Riwut dalam konteks terjadinya Indonesia dapat disepadankan dengan perasaan terjajah.

Perasaan senasib yang dialami bersama oleh sekelompok orang dalam waktu yang panjang atau yang disampaikan oleh Thung dkk. (2004: 4) melalui proses sejarah, apa pun bentuknya, akan tersedimentasi membentuk suatu identitas tertentu bagi kelompok tersebut. Adapun bentuk yang biasanya mudah membentuk identitas adalah nasib yang tidak menyenangkan, seperti yang kini sering disebut marginalisasi.

---

Perbincangan tentang “siapa” dilanjut atau ditaut dengan lokasi, sebuah logika yang lazim karena setiap bangsa berasal dan berdiam di tanah atau tempat tertentu. Identifikasi Dayak paling sederhana yang disampaikan Baboe dan Riwut juga mengasosiasikan dengan wilayah.

Potongan puisi penutup artikel “Een volk dat left, bouwt aan zij toekomst”<sup>57</sup> berikut menunjukkan sebuah identifikasi lokasi bahwa jika Dayak disebut dengan bangsa kita, maka Kalimantan disebut dengan tanah kita atau tanah airku.

“O Kalimantan tanah airkoe, tempat mengasoe mendjaga adik.  
Selagi kecil kami dipangkoe, sebeloem besar hendaklah didik.

---

57 Artikel yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan menjadi “Sebuah Bangsa yang Membangun Masa Depan” ini memuat propaganda pentingnya pendidikan kepada kaum tua agar bersedia menyekolahkan putra-putrinya.

- O Kalimantan tanah airko, pendoedoekmoe teroetama hidoep bertani.
- Wahai boenda serta ajahko, masoek sekolah serahkan kami.
- O Kalimantan tanah airko, tempat jang soeboer goena bersawah.
- Beladjar radjin kami mengakoe, asal sadja disoeroeh ajah" (Pepas, Januari 1940: 1).

Identitas tempat hidup sesekali disebut secara spesifik "Tanah Dajak". Istilah "Tanah Dayak" ditemukan dalam laporan atau berita organisasi, seperti pada kolom berjudul "Di bawah ini kami terakan sebahagian dari pidato Voorzitter H.B. perhimpoean kita tentang daftar oesaha Pakat kita". Imbauan ringan untuk bagian dokumentasi berikut, "... membeli segala boekoe2 jang mentjeritakan keadaan **bangsa Dajak**, mempelajari boekoe2... soal adat istiadat **bangsa Dajak** ... serta diketahoei oleh mereka yang akan datang, mengoempoeikan segala tjerita jang oemoem di **tanah Dajak**." Pada bagian selanjutnya terlihat digunakan dalam konteks politik "HB [singkatan dari Hoofd Bestuur, berarti pengurus pusat yang dalam hal ini Pakat Dayak] haroes menoentoet berdirinja Raad Adat di **tanah Dajak** karena hoekoem pengadilan negeri jang didjalankan sekarang masih banjak jang tak sesoeai dengan perasaan **bangsa kita** dus bertentangan dengan perasaan dalam adat" (SP, Februari 1940: 1).<sup>58</sup>

Selain tanah, identitas bangsa sangat erat dengan **bahasa** dan **adat**. Materi kedua tema tersebut sempat mengundang protes pembaca karena dinilai "Ngajuisme" (SP No. 6, Juni 1940: 18). Diskusi baik berupa korespondensi maupun artikel terkait persoalan tersebut muncul dalam beberapa edisi.

Kecenderungan mengakomodasi kebudayaan Ngaju memang muncul seperti kolom "Adatrecht" (Hukum Adat) SP yang hanya diisi oleh tradisi adat komunitas Ngaju saja ataupun wacana menjadikan Ngaju sebagai bahasa persatuan Dayak berikut.

"Bahasa yang kita gunakan ini, yaitu yang disebut dengan bahasa Ngaju, sudah ditetapkan sebagai bahasa induk bagi seluruh 'utus itah' keturunan kita. Bahasa ini dapat kita gunakan sebagai media untuk mempererat persatuan bagi seluruh keturunan kita. Oleh karena itu, maka jangan lagi menyebut bahasa ini sebagai bahasa Ngaju atau bahasa Dayak Ngaju, tetapi

<sup>58</sup> Kutipan ditulis apa adanya kecuali beberapa penebalan kata dilakukan oleh penulis untuk menunjukkan istilah yang sedang dibicarakan dan sebuah penjelasan ditulis di dalam kurung siku.

cukup kita sebut sebagai "bahasa Dayak", yang akan selalu kita sampaikan baik bagi orang luar maupun bagi sesama kita."<sup>59</sup>

Protes ditanggapi oleh redaksi dengan menyatakan bahwa tujuan pergerakan "soepaja kita semoea merasa di dalam hati kita dan mengakoe bahwa kita adalah seorang poetra atau poetri Dajak, ... walaepoen bahasa jang kita pakai sehari-hari di tempat kediaman kita masing2 bahasa Ngadjoe, Ot Danoem, Maanjan, Katingan dsb-nja. Djika soedah demikian tentoe persatoean kita akan lebih tegoeh dan sempoerna."

Diskusi dalam mengidentifikasi **kultur** Dayak tidak hanya sebatas persoalan *ingroup*. Artikel terkait kultur juga membicarakan kemunculan wacana di kalangan mereka terhadap gagasan pemuatan (pengubahan) "kesopanan Barat" ke dalam "Adat Kesopanan Loehoer Kita". Dengan alasan "doenia modern sekarang tengah bergontjang" maka harus diperhatikan benar akibatnya nanti menjadi untung atau rugi dan penanggap ini mengajukan ketidaksetujuannya bahwa "adat sopan jang Loehoer sepenoehnja didalam hoekoem adat bangsa memang soedah ada hadat haloes oentoek bangsa Dajak jang rasanja tiada perloe ditambah Adat sopan loear negri" (Baboe, Februari 1940: 4).<sup>60</sup>

Identifikasi Dayak juga meliputi **identitas agama**. Segolongan kelompok mengidentifikasi bahwa bangsa Dayak hanya terdiri atas penganut *heiden* (kepercayaan) ataupun Nasrani (R, Januari 1940: 2). Tidak secara langsung, pendapat tersebut dinegasi oleh dua artikel yang ditulis mewakili Pakat Dayak. Pertama, masih dalam konteks menanggapi artikel di *Brita Bahalap* No. 6 Tahun 1939. Baboe (Februari 1940: 3-4) menyatakan "... roepanja beliau chilap di tengah-tengah bangsa Dajak adalah agama Dajak asal, Kristen dan Islam." Lebih lanjut, Baboe mengemukakan titik temu antara ketiga kepercayaan tersebut.

"Djika orang dapat mengetahoei seloeroeh isinja jang dinamakan agama Dajak (Heiden) itoe dan tahoe poela dia akan isinja agama Christen dan Islam jang mereka masing2 ada mempoenjai keterangan di dalam Torat atawa Al-

59 Diterjemahkan oleh Gauri Vidya Dhaneswara dari: "Basan itah idja ihapan itah toh, ie te idje injewoet basa Ngadjoe, djari inoekas akan indoe basa idje ihapan itah mamboelat oetoes itah (bahasa persatoean akan itah). Tagal te kea' basa toh ela itah manje woetoe basa Ngadjoe atawa basa DAJAK NGADJOE hindai, tapi patoet toentang soekoep amon itah manggare djete BASA DAJAK bewei, aloh akan hoeang aloh akan loear (SP No.1, Januari 1940: 5)."

60 Perdebatan dengan penganjur asimilasi. Sayangnya, artikel (*Brita Bahalap*) yang dikomentari belum diperoleh penulis.

Qoran. Bahwa Agama Dajak menoenjoekan "Hatala" atawa Allah memang ada dalam bahasa Sangen namanja Allah itoe adalah nama jang sesoeai dalam bahasa Sangen...

Agama Dajak mengakoei didalam kepertjajaannya, bahwa Allah jang tertinggi diantara segala kepertjajaan jang lain..."

Pandangan Baboe diperkuat oleh WBR dalam konteks kelembagaan. WBR menyatakan bahwa "Pakat Dajak ada NEUTRAAL, dari AGAMA jang mana djoeapoen ... pakat kita bermaksoed mempersatoekan bangsa kita dengan tidak menoleh kepada agama" (WBR, April-Mei 1940: 5). WBR dalam artikel "Pakat Dajak Terhadap Dengan Agama" ini menekankan bahwa Dayak yang disebut dengan bangsa kita semata merupakan kesatuan etnik.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa kala itu konsep Dayak sedang dibangun. Dalam proses konstruksi tersebut pula terlihat perbedaan cara pandang dan kepentingan dari dalam kelompok terkait identitas kelompok. Identitas Dayak sebagai bangsa melekat pada tanah, adat, dan bahasa, namun tidak terhadap agama. Secara nyata, dewan redaksi ingin membangun citra keberagaman agama atas etnik Dayak. Upaya mendefinisikan Dayak, dalam uraian tadi menunjukkan upaya untuk membangun kesadaran sebuah bangsa bahwa keberadaannya adalah keniscayaan.

## 2. Penguatan Etnik

Perbincangan tentang identitas berlanjut atau mengarah pada penguatan etnik dan persatuan, entah dalam skop ingroup atau lebih luas (perihal terakhir ini dibahas pada bagian selanjutnya). Pendefinisian Dayak oleh Hausman Baboe yang dibahas sebelumnya berlanjut pada upaya penguatan etnik. Uraian Baboe mengarah pada argumen bahwa etnik asli dan tertua di Kalimantan, berkebudayaan luhur, dan **setara** dengan bangsa lain. Isu terakhir tentang kesetaraan merupakan sebuah isu khas nasionalisme di dunia dan diserap oleh para nasionalis Indonesia.

Materi Baboe memuat kekayaan tradisi lisan Dayak, salah satunya Hikayat *Lewoe Djoeking*, yang mengandung pesan kemerdekaan nusa-bangsa. Cerita hikayat dilanjut Baboe dengan klaim bahwa ilmu pengetahuan Dayak sejak dulu sudah mengenal asal-usul manusia. Manusia dalam tradisi Dayak terdiri atas tiga warna kulit yang beragam

atau dikenal dengan Maharadja Boenoe, Maharadja Sangen, dan Maharadja Sangiang. Ketiganya berasal dari satu keturunan Toenggoel Garing Djan Djahoenan Laoet dan berarti ketiganya memiliki kedudukan yang sama sebagai anak. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa agama Dayak juga mengenal Hatalla atau Allah sebagaimana Islam dan Kristen. Dayak juga memiliki kebudayaan luhur yang ditunjukkan oleh keberadaan satu-satunya hukum adat bangsa di Kalimantan. Uraian Baboe melalui tradisi lisan memuat pesan bahwa bangsa Dayak juga memiliki kebudayaan sehingga setara dengan bangsa lain dan berhak merdeka. Kemerdekaan yang diajukan oleh Pakat Dayak kala itu berupa kepemimpinan yang berasal dari kelompok Dayak sendiri serta memiliki suatu daerah (tanah) untuk mereka sendiri.

Isu kesetaraan juga disampaikan oleh Tjilik Riwut (1940: 6) dalam tulisan berbahasa Ngaju berjudul “Pakat ttg. [toentang] Oetoes” yang berarti “Persatuan dan Keturunan”. Ia menyampaikan bahwa bangsa Dayak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban dunia. Oleh karena itu, bangsa Dayak memiliki hak yang sama. Kesadaran untuk menjadi setara ini juga dilatari oleh sikap dari kelompok lain, seperti yang dapat dideteksi dari ungkapan berikut, “Kita harus berani berhadapan dengan orang yang menjelek-jelekan keturunan dan organisasi kita ... berpegang teguh pada kebenaran, percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki. Karena kita punya kedudukan yang sama dengan manusia lainnya ... untuk kepentingan mengangkat harkat dan martabat keturunan kita.”<sup>61</sup>

Salah satu tanggapan untuk menandingi stigma buruk adalah perbaikan citra Dayak yang dapat dilakukan melalui media massa. Ide ini disampaikan oleh Kalompen dalam artikel berjudul “Nama Bangsa Kita”. Kalompen mengajukan agar publikasi prestasi komunitas Dayak di surat kabar dengan cakupan sebaran se-Hindia Belanda. Kalompen menambahkan bahwa foto adalah konten efektif untuk memperbaiki citra Dayak secara nyata. Foto konferensi Pakat Dayak yang menampilkan profil Dayak intelek berdasi menurutnya mampu

61 Potongan kutipan diterjemahkan oleh Gauri Vidya Dhanevswara dari:

*“Basa oetoes itah Dajak te, tame kea idje bagian bangsa hong kaloenen toh, idje aton bara hak aie. Itah toh, iete idje kahimat, bara kabagi P.D. idje tantai manggoeang kare matjam kahalap akan oetoes itah... Itah patoet bahanji hataharep dengan eweh kea idje mamapa oetoes-mamapa pakat itah toh, tapi itah hong katotodjete idje patoet iimbing itah. Patoet taoe maharaparep kaboeat; itah patoet taoe mahaga ttg, mangkeme idje itah toh olon... Awi te, kare pangatawan kare kapintar kaharatie ramoe rakas panataw patoet inggoena akan oetoes.”*

mengimbangi gambaran Dayak bercawat. Dengan perbaikan citra, ia berpendapat “baroelah nama bangsa kita boleh dimoeat dalam daftar nama bangsa<sup>2</sup> choesoes di Indonesia ini” (Kalompen, Maret 1940: 1).

Pencitraan yang disarankan Kalompen diakomodasi oleh redaksi, seperti yang tampak pada gambar berikut. Kedua foto menampilkan citra kaum terpelajar masa itu yaitu gaya berbusana necis mengenakan jas, dasi, celana pantolon, dan sepatu pantofel.



Gambar 13 Kunjungan kelompok Dayak ke Kantor Balai Pustaka dan anggota Kepanduan Bangsa Dayak. (Soeara Pakat, Agustus 1940: 2; 8).

Penguatan kelompok etnik juga disampaikan dalam bentuk puisi berjudul “Kalimantan Tanahkoe” berikut. Baris-baris puisi menunjukkan keterkaitan antara stigma buruk sebagai motif penguatan etnik.

“... Meskipun doenia memandangnja rendah, Dikatakan di sana tempat biadab

Pada matakoe molek dan indah, Satoe dan doea ta' djadi sebab.

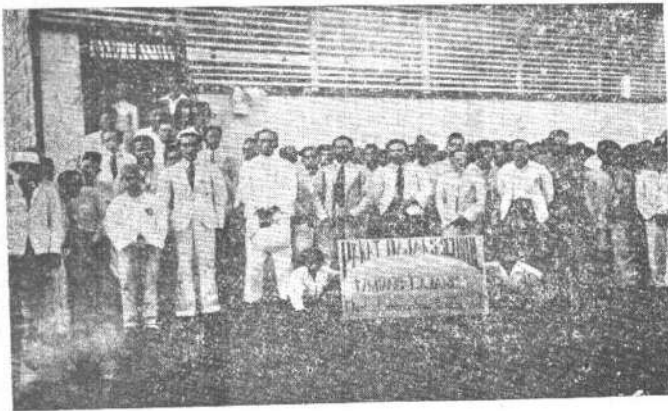
Berkat oesaha poetra pertiwi, Pandangan oemoem jakin beroebah

Kilat Mandau, pedang djenawi, Djalan loeroes hendak dirambah.

Kini masanja kita bergerak, Poetra dan poetri satoe toedjoean.

Soeara Pakat djadi semarak, Alat pengedjar ke kemadjoean” (SP, Januari 1941: 11).

Penguatan etnik dalam praktiknya diupayakan dalam program-program yang hanya bertujuan untuk bangsa Dayak (SP, Maret 1940). Dua program utama di bidang ekonomi dan pendidikan, yakni koperasi dan sekolah ini kemudian bahkan lebih terkenal dan terkenang ketimbang Pakat Dayak sebagai organisasi (Wawancara Rizali Hadi dan Aris Djinal, 7–8 Agustus 2019).



Pakat Dajakschool diboeka dengan Leerplan Schakel di Tamiang Lajaag; bersama bestuur-bestuur tjabang dan goeroe-goeroe seita wakil pamarentah.

Gambar 14 Siswa Sekolah Pakat Dayak di Tamiang Layang.

(Soeara Pakat, Juni 1940: 9).

Pendirian sekolah terutama di permukiman Dayak, jauh dari Kota Banjarmasin menjadi prioritas pengurus PD dan gencar diberitakan di SP sehingga berita tentang sekolah hampir selalu ada dalam setiap



terbitan. Prioritas akan pendidikan diungkapkan dalam tulisan reflektif Tjilik Riwut (April-Mei 1940: 9–11) dalam bahasa Ngaju berjudul “Kamiar Oetoes Itah Dajak Hong 100 Njelo” yang berarti “Kemajuan Orang Kita Dayak 100 Tahun yang Lalu”. Artikel ini mempertanyakan kepada diri sendiri, mengapa masyarakat Dayak (dalam konteks ini yang dimaksud Ngaju) yang sudah memperoleh pendidikan sejak 100 tahun lalu masih saja terbelakang terutama jika dibanding dengan kemajuan di pulau-pulau lain. Secara khusus Riwut membandingkan dengan kemajuan orang-orang Batak yang meski lebih lambat menerima pendidikan, mereka cepat mengejar ketertinggalan dengan terus melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Lagi-lagi Riwut membandingkan dengan sikap kelompok masyarakatnya yang cenderung berpuas dengan membaca dan menulis saja.<sup>62</sup>

Penguatan etnik dilakukan dengan membangun konsep diri, dilanjutkan oleh kesadaran akan keberadaan diri sebagai sebuah entitas yang nyata, berlanjut pada pernyataan-pernyataan motivasi untuk memajukan dan membangun diri. Selain kesetaraan, modernitas terkandung dalam citra Dayak berdasi versus Dayak bercawat. Modernitas kolonial yang memengaruhi dan menjadi perhatian para redaktur SP adalah pendidikan formal dan kesehatan bagi perempuan atau kaum ibu, anak, dan bidan kerap diberitakan dalam porsi lebih ketimbang konten lain 2–4 halaman. Kedua karakter modernitas yang dipandang sebagai gerbang kemajuan masyarakat, khususnya berita tentang perempuan dimuat khusus bertajuk “Kabar Baris Bawi” yang sebagian besar menggunakan bahasa Ngaju. Adapun ciri modernitas kolonial lain seperti lembaga ekonomi (bank) dan perkebunan karet jarang sekali dimuat dalam SP.

62 Diterjemahkan oleh Prof. M.P. Lambut, Ems dari:

*"Amoen akoe moendoek soeni2 te akoe paham angkat kapehen ateikoe, amon akoe mananding kamiar oetoeskoe amon akoe mananding ampin kamiar oetoeskoe hong wajah toh... Mahi2 tinai hong hare kamiar sakola, poena paham toto ampin kalihie dengan oetoes awing beken. Ela ah idje taoe manoemon olah awang hong Djawa poena paham balihi toto. Amoen akoe dia salaja itah oetoes Dajak toh djari koerang lebih 100 njelo halau djari nampara ati tame sakola, ati manampara kea tame lakau ngadjoe. Djari bara metoh te itah djari mangasene kea ampin djalan sekola... Mahin tinai amon itah mita ampin kamiar oetoes ain olah BATAK, ewen te hong 75 Njelo paham toto ampin kare kamiare, kanih kante ati sakola bara idje randah sampai idje sadang."*

### 3. Persatuan Bangsa: Menjadi Dayak dan Menjadi Indonesier-Dayak

Baboe menyatakan bahwa mempersatukan masyarakat Dayak bukanlah hal mudah (Baboe, Februari 1940) dapat dilihat dari artikel berisi klaim-klaim tertentu dan diskusi yang mengemuka di *Soeara Pakat*. Artikel dalam kolom *Adatrechtyang* setiap edisi hanya memuat perihal adat Ngaju diprotes pembaca karena dinilai “Ngadjoeisme”. Artikel dimaksud antara lain memuat klaim bahwa bahasa Ngaju sebagai bahasa induk (utama) ataupun pengajuan pembakuan bentuk hukum adat Dayak dinilai pembaca menceraubut suku-suku bangsa (Dayak) dari lingkungannya. Artikel protes berjudul “Menoentoet persatoean bangsa Dajak” dari pembaca tidak dimuat dengan alasan dari redaksi bahwa tujuan PD semata untuk membangun “persatuan yang teguh dan sempurna” sehingga tercipta perasaan dan pengakuan sebagai **putra-putri** Dayak (SP, Juni 1940: 18).

Perasaan persatuan diilustrasikan dengan baik oleh M. Bahnoen, pelajar Kalimantan di Surabaya. Bahnoen (Juni 1940: 5–6) memberi tanda tumbuhnya persatuan jika “seorang poetera Kalimantan bersoewa dengan seorang poetera Kalimantan jang lain, jang belon dikenalnja mereka terikat satoe sama lain dengan segera, seolah-olah mereka daholoenja telah pernah berkoempoel ... sebagai orang jang telah lama bersahabat.”

Adapun klaim sebagai satu **keturunan** kerap diajukan Riwut dalam beberapa artikel tentang gagasan persatuan bangsa. Riwut (Januari 1940: 3–4) menyatakan “apabila kita sudah meyakini apa yang kita rasakan, ... tidak ada lagi penamaan Ma’anyan, Kapuas, Sahei, Malahui ataupun Seruyan. Semua harus mengakui sebagai **keturunan Dayak**.” Seruan persatuan Dayak ini dilanjutkan dengan persatuan menjadi bagian dari Indonesia berikut. “... Harus kita ingat, bahwa kita adalah satu keturunan, bersaudara dalam upaya mencapai tujuan bersama. Satu tujuan utama kita adalah untuk mengangkat harkat keturunan kita, tanah kita Pulau Kalimantan, seluruh Indonesia.”<sup>63</sup>

63 Diterjemahkan oleh Gauri Vidya Dhaneswara dari potongan artikel berjudul “Pakat ttg. Oetoes”: “Patoet itah mingat, idje itah toh, oeras hampari idje kahimat idje tintoen itah iete mangaboeah oetoes ttg. Petak danoem itah, tinai hapoes poelau itah Kalimantan, joh hapoes tanah Indonesia toh.”

Nama Indonesia tidak sering disebut dalam SP. Selain Riwut, pandangan tentang menjadi Indonesia hanya ditemukan dalam artikel berjudul “Tjita-Tjita” pada rentang tahun 1940. Bukan dalam bentuk seruan atau imbauan ala Riwut, penyampaian menjadi Indonesia oleh F.S. Onong (Juni 1940: 10–12) seolah sudah sebagai penerimaan umum. Dalam konteks membicarakan tujuan organisasi, Onong menyatakan bahwa “Pakat Dajak berdiri boeat mempersatoekan Indonesir Dajak, mengangkat deradjat, martabat dan hakekat Indonesir Dajak, atau mengambil tindakan akan menjama hak Indonesir Dajak terhadap noesa dan bangsa lain sekelilingnja ....”

Untuk mendukung gagasan menjadi bagian dari Indonesia ini sepertinya membuat Riwut sebagai pemimpin redaksi turut memuat pengumuman terkait perhimpunan pemuda dalam skop Indonesia seperti Maklumat Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Selain itu, ia juga sesekali memuat artikel yang menggagas cita-cita persatuan Indonesia dari organ media pergerakan lain seperti artikel berjudul “Keboedajaan Borneo” dari Gusti Sulung Lelanang yang di-relay dari majalah *Kesedaran*. Artikel Lelanang tampaknya dipilih karena cita-cita menjadi Indonesia hanya dicetuskan sekali dalam uraian sepanjang tiga halaman tentang folklor di Kalimantan.

Gagasan menjadi Indonesia yang disampaikan kerap disisipkan Riwut saat menggagas persatuan Dayak ditanggapi dalam artikel-artikel hasil laporan pertemuan resmi organisasi PD dan artikel pembaca. Artikel tanggapan berpendapat agar PD lebih berfokus pada tujuan persatuan dan pemajuan bangsa Dayak dan jangan dulu melibatkan diri dalam pergerakan kebangsaan Indonesia.

Diskusi tentang arah pergerakan Pakat Dayak antara berfokus pada pergerakan di dalam kelompok atau membuka diri dengan aktivitas pergerakan kebangsaan yang lebih luas menunjukkan keragaman pemikiran di dalam organisasi. Pemuatan perbedaan pandangan dalam *Soeara Pakat* sehingga diskusi antar-pemikiran dapat dipahami pembaca menunjukkan sikap keterbukaan redaktur dan organisasi.

### C. SIMPULAN

*Soeara Pakat* edisi tahun 1940 menunjukkan harapan besar untuk mempersatukan berbagai kelompok etnik penduduk Kalimantan yang tidak mengidentifikasi diri sebagai Melayu (termasuk Banjar yang mulanya kerap ditempel oleh identitas Melayu menjadi Melayu-Banjar) dalam sebuah identitas bersama, Dayak. Proses konstruksi tersebut berlangsung bersamaan dengan berkembangnya gagasan ke-Indonesia-an. Gagasan ke-Indonesia-an dipadukan dengan gagasan persatuan Dayak oleh segelintir anggota Pakat Dayak sehingga menghasilkan konsep Indonesia-Dayak (*Indonesier-Dayak*).

Gagasan persatuan Dayak disampaikan secara lugas dalam porsi jauh lebih besar dibanding dengan gagasan Indonesia-Dayak. Gagasan kedua muncul secara tersirat atau lebih tepatnya disisipkan oleh penulis dalam artikel yang sebenarnya mengangkat gagasan utama lain. Kenyataan yang tidak mengherankan (atau dalam konteks berorganisasi bahkan sudah seharusnya) mengingat *Soeara Pakat* adalah media propaganda Pakat Dayak yang bertujuan membangun persatuan Dayak.

Persatuan Dayak merupakan impian yang dicapai melalui upaya membangun identitas dan penguatan diri. Wacana identitas etnik dibangun melalui proses identifikasi diri, mulai dari pendefinisian Dayak; tujuan persatuan; atribut apa saja yang menyertai status bangsa, yakni bahasa (bahasa persatuan Dayak), wilayah (tanah Dayak), budaya Dayak, dan pemimpin Dayak; dan konsekuensi-konsekuensi positif jika tercapai persatuan bangsa Dayak. Wacana identitas tersebut secara praktis menghasilkan usulan dewan adat serupa Dewan Banjar, pemimpin wilayah administrasi, dan usulan pembentukan wilayah khusus berdasarkan etnik Dayak.

Wacana persatuan Dayak dan Indonesia-Dayak dihasilkan dalam situasi kolonial. Lingkungan sosial menciptakan kelas menengah kota, dalam hal ini intelektual Dayak khususnya Ngaju yang kesadaran politiknya berkembang di Banjarmasin, Surabaya, dan Jakarta. Kesadaran politik dalam berhadapan dengan kelompok etnik lain pada wadah negara kolonial. Lingkungan politik baik pergaulan dan kiprah elite Dayak dalam sistem administrasi kolonial maupun program politik kolonial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel

- Anderson. 2008. *Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist Press-Pustaka Pelajar.
- Asnaini. 2011. *Sarekat Dayak: Peranannya dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan di Kalimantan Tengah*. Pontianak: BPSNT Pontianak.
- Ave, Jan B. dan Victor T. King. 1986. *People of the Weeping Forest: Tradition and Change in Borneo*. Leiden: National Museum of Ethnology.
- Bondan, Amir Hasan Kiai. 1982. *Suluh Sedjarah Kalimantan*. Banjarmasin: Fadjar.
- Bourchier, David. 2010. "Kisah Adat Dalam Imajinasi Politik Indonesia dan Kebangkitan Masa Kini" dalam Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (ed.). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: YOI-KITLV Jakarta.
- Brown, Iem (ed.). 2009. *The Territories of Indonesia*. London-NY: Routledge.
- Cahyaningrum, Dewi. 2018. "Analisis Wacana-Historis Model Ruth Wodak" dalam Wening Udasmoro (ed.). *Hamparan Wacana: Dari Praktik Ideologi, Media, hingga Kritik Poskolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Davidson, Jamie Seth. 2002. "Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia". Disertasi. Washington: University of Washington.
- \_\_\_\_\_. 2003. "Primitive Politics: The Rise and Fall of the Dayak Unity Party in West Kalimantan, Indonesia" dalam *Asia Research Institute, Working Paper Series No. 9*.
- Dese, Anthel, dkk. 1978/1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Tengah*. Jakarta: Depdikbud.
- Ideham, M. Suriansyah, dkk. (ed.). 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Balitbangda Prov. Kalimantan Selatan.
- Klinken, Gerry van. 2007. "Dayak Ethnogenesis and Conservative Politics in Indonesia's Outer Islands" dalam <https://www.researchgate.net/publication/228195956>, diakses pada Agustus 2019.

- \_\_\_\_\_. 2011. "Mengkolonisasi Borneo: Pembentukan Provinsi Dayak di Kalimantan" dalam Sita van Bemmelen dan Remco Raben (ed.). *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia-KITLV.
- Laksono, P.M., dkk. 2006. *Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia: Belajar dari Tjilik Riwut*. Yogyakarta: Galangpress.
- Listiana, Dana. 2011. *Banjarmasin Akhir Abad XIX hingga Medio Abad XX. Perekonomian di Kota Dagang Kolonial*. Pontianak: BPSNT Press.
- Mahin, Marko. 2005. *Tamanggong Nikodemus Ambo Djaja Negara: Menyusuri Sejarah Sunyi Seorang Temenggung Dayak*. Banjarmasin: Lembaga Studi Dayak 21.
- Mansyur, dkk. 2018. *Sejarah Gerakan Kepemudaan di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.
- Miert, Hans van. 2003. *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930*. Jakarta: Utan Kayu.
- Mulder, Niels. 2000. *Individu, Masyarakat, dan Sejarah: Kajian Kritis Buku-Buku Pelajaran Sekolah di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nawawi, Ramli, Idwar Saleh, dan A. Gazali Usman. *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Depdikbud.
- Tanasaldy, Taufiq. 2012. *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politics of West Kalimantan*. Leiden: KITLV.
- Thung Ju Lan, Yekti Mauniati, dan Peter Mulok Kedit. 2004. *The (Re) Construction of the 'Pan Dayak' Identity in Kalimantan and Serawak: A Study on Minority's Identity, Ethnicity and Nationality*. Jakarta: Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
- Riwut, Tjilik. 1958. *Kalimantan Memanggil*. Jakarta: Endang.
- Saleh, Idwar, dkk. 1977/1978. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Depdikbud.
- Singarimbun, Masri. 2013. "Beberapa Aspek Kehidupan Masyarakat Dayak" dalam *Humaniora*, hlm. 139-151.
- Sjarifuddin. 1974. "Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950". Skripsi. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.

- Syahrudin. 2017. *Orang Banjar (Menjadi Indonesia): Dinamika Organisasi Islam di Borneo Selatan 1912–1942*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Usop, K.M.A.M. 1994. *Pakat Dayak: Sejarah Integrasi dan Jatidiri Masyarakat Dayak & Daerah Kalimantan Tengah*. Palangkaraya: Yayasan Pendidikan & Kebudayaan Batang Garing.
- Wajidi. 2007. *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901–1942*. Banjarmasin: Pustaka Banua.

### **Surat Kabar**

- Baboe, Hausman. Februari 1940. “Lezing” (pelajaran) berjudul “t. Hausmann Baboe tentang Hoekoem Adat Dajak Loehoer dalam Conferentie Pakat Dajak jang pertama di Bandjermasin pada boelan December 1939” dalam *Soeara Pakat*. No. 2, Th. II, hlm. 3–4.
- Bahnoen, M. Juni 1940. “Soeara Pers” dalam *Soeara Pakat*. No. 6, Th. II, hlm. 5–6.
- De Indische Courant* No. 42, 3 November 1925.
- D. Inso-Pepas. Januari 1940. “Een volk dat left, bouwt aan zij toekomst” dalam *Soeara Pakat*. No. 1, Th. II, hlm. 1.
- Kalompen. Maret 1940. “Nama Bangsa Kita” dalam *Soeara Pakat*. No. 3, Th. II, hlm. 1.
- Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers* No. 17, 1923.
- Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers* No. 14, 1924.
- Onos, F.F. Juni 1940. “Tjita-Tjita” dalam *Soeara Pakat*. No. 6, Th. II, hlm. 10–12.
- Pendjajah. Juni 1940, “Apakah Arti Kewadajiban” dalam *Soeara Pakat*. No. 6, Th. II, hlm. 8–10.
- R. Januari 1940. “Adatrecht Bangsa Dajak Ngadjoe: Bahagian I: Dari Hal Adat Istiadat dan peratoeran boedjang laki-laki dan boedjang perempoean bangsa Dajak Ngajoe” dalam *Soeara Pakat*. No. 1, Th. II, hlm. 2.
- Riwut, Tjilik. Januari 1940. “Pakat ttg. Oetoes” dalam *Soeara Pakat* No. 1, Th. II, hlm. 6.
- \_\_\_\_\_. April–Mei 1940. “Kamiar Oetoes Itsh Dajak Hong 100 Njelo” dalam *Soeara Pakat*. No. 4–5, Th. II, hlm. 9–11.

\_\_\_\_\_. Juni 1940. “Tentang Symbol Pakat Dajak” dalam *Soeara Pakat*. No. 6, Juni 1940, hlm. 3.

\_\_\_\_\_. Juni 1940. “Indonesier Dajak Kalimantan,” dalam *Soeara Pakat*. No. 6, Th. II, hlm.10–12.

*Soeara Pakat* No. 1–8, 1940; No.3, 1941.

WBR. April–Mei 1940. “Pakat Dajak Terhadap Dengan Agama” dalam *Soeara Pakat*. No. 4–5, Th. II, hlm. 5.

### **Informan**

1. Prof. M.P. Lambut, Ems. (wawancara di Banjarmasin 5–6 Agustus 2019).
2. Prof. Dr. Rizali Hadi. (wawancara di Banjarmasin 7 Agustus 2019).
3. Drs. Aris Djinal. (wawancara di Banjarmasin 7 Agustus 2019).
4. M. Budi Zakia Sani (wawancara di Banjarmasin 4–5 Agustus 2019).
5. Gauri Vidya Dhaneswara. (wawancara via online Oktober 2019).

---

## **Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat**





---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

# Ibnu Hadjar: Pemikiran dan Perjuangan dalam Menegakkan Keadilan

Yusri Darmadi

Mendengar nama Ibnu Hadjar, pikiran kita kembali pada saat menjadi siswa SMP atau SMA, khususnya ketika mata pelajaran IPS atau Sejarah. Informasi tentang Ibnu Hadjar hanya selintas kalau tidak mau dikatakan hanya satu paragraf yang menjelaskan bahwa nama tersebut merupakan pimpinan “gerombolan” Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT) yang melakukan “pemberontakan” di wilayah Kalimantan Selatan dan bagian dari kelompok Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di wilayah Kalimantan. Apakah kita pernah menanyakan lebih lanjut, apakah penyebab beliau melakukan “pemberontakan”? Apakah benar kelompok yang beliau pimpin (KRjT) merupakan bagian dari DI/TII wilayah Kalimantan? Siapakah sebenarnya sosok Ibnu Hadjar yang berani melakukan “pemberontakan” atau perlawanan terhadap negara yang sesungguhnya beliau tahu akibatnya? Bagaimana pula pemikiran dan tindakan beliau yang berani mempertaruhkan jiwa dan raga untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Berikut ini ulasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

## A. ANAK “NAKAL” DARI AMBUTUN

Terlahir dengan nama Haderi, Ibnu Hadjar lahir pada April 1920 di Ambutun, Telaga Langsat, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Ayahnya bernama Umar dan ibunya bernama Siti Hadijah, putri dari seorang kepala suku Dayak di Tamiang Layang (Kalimantan Tengah). Beliau memiliki seorang adik kandung bernama Dardiansjah. Beliau

menikah dua kali. Dari istri pertama memiliki putra bernama Raf'i. Adapun istri kedua berasal dari Buntok (Iqbal, 2018: 111).

Semasa kecil, beliau suka berkelahi dan selalu menang dalam perkelahian. Ibnu Hadjar dikenal juga sebagai sosok yang keras dan pemberani oleh teman-teman sebayanya. Aktivitas sehari-hari pada masa kanak-kanak adalah membantu orang tuanya untuk bertani, berkebun dan bercocok tanam, serta berburu di hutan pegunungan Meratus (Irwandi 2019: 7–8). Sekolah dasarnya hanya sampai tingkat kelas 5 di Angkinang (Wawancara Baraji, 64 tahun, 10 Agustus 2014 dalam Setiawan, 2014: 90). Ibnu Hadjar bertubuh gempal, tinggi kira-kira 165 cm, bermata sipit, warna kulit putih dan mempunyai alis mata yang panjang, tutur katanya halus (Wawancara Samsudin, 48 Tahun, 22 Juli 2014 dalam Setiawan 2014: 95).



Gambar 15. Ibnu Hadjar dan adiknya, Dardiansjah.  
(Sumber: Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan)

Di balik sosok yang keras dan pemberani, Ibnu Hadjar juga merupakan seorang yang alim dan arif dalam beragama. Beliau mengajarkan membaca Al-Qur'an dan kitab Perukunan Melayu karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Datuk Kalampayan), seorang ulama dan mufti Kesultanan Banjar bermazhab Syafi'i. Aura karismatik melekat pada Ibnu Hadjar dengan menjadi tokoh agama Islam sehingga sebagian orang di kampungnya menjadi simpati terhadap beliau (Irwandi, 2019: 13).

Sebelum masa pendudukan Jepang, Ibnu Hadjar sehari-hari bekerja sebagai petani dan pencari madu yang andal (Iqbal, 2018: 111). Untuk mencari madu, beliau melakukannya seorang diri dengan memanjat pohon yang ada sarang lebah untuk mengambil madu di sarangnya, padahal sangat berbahaya kalau memanjat pohon yang ada sarang lebah seorang diri (wawancara Fian, 52 Tahun, 22 Juli 2014, dalam Setiawan, 2014: 98). Beliau tidak bisa membaca aksara Latin, hanya mampu membaca aksara Arab dan Arab Melayu (Aizid, 2013 dalam Irwandi, 2019: 12).

Salah seorang pensiunan tentara di Kandangan menceritakan tentang Ibnu Hadjar saat berperang melawan pasukan Belanda berikut ini.

“Aku ingat benar dahulu biasa terjadi pertempuran lawan pasukan Belanda, pertempuran itu terjadi di Simpang Lima Kandangan. Pada waktu itu Ibnu Hadjar disuruh R. Sukandi pimpinan dari Markas Daerah x-18 untuk melakukan pengacauan di Kandangan, untuk mengalihkan perhatian Belanda terhadap pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan markas daerah yang diadakan di Desa Durian Rabung, agar kegiatan dapat berjalan aman dan lancar. Ketika para tentara Belanda melakukan patroli di Simpang Lima Kandangan, pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar berhasil membuat pasukan tentara Belanda lari ketakutan. Kebanyakan dari korban yang tewas pada waktu itu adalah pasukan Belanda. Pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar hanya mengalami luka-luka saja. Satu yang gugur pada saat pertempuran waktu itu yaitu bernama Saberan.” (Wawancara Sarmadi, 77 tahun, 10 Agustus 2014, dalam Setiawan, 2014: 89).

---

Peristiwa yang sama juga diceritakan oleh seorang petani di Telaga Langsat berikut ini.

“Aku ingat betul yang diceritakan ayahku<sup>64</sup> tentang keberanian Ibnu Hadjar, ketika pertempuran yang terjadi di Padang Batung dan Batu Laki. Awal pertempuran itu terjadi adalah militer Belanda yang berniat melakukan penyerangan ke Desa Ni’ih, namun rencana penyerangan itu terhalang di Pos penjagaan x-18 yang dipimpin Ibnu Hadjar yang berada di Padang Batung. Ibnu Hadjar yang naik di atas pepohonan melihat pasukan Belanda mendekat dengan pos penjagaan yang di pimpin beliau. Dengan kesigapannya Ibnu Hadjar langsung turun ke jalan dan menyerang pasukan militer Belanda. Melihat Ibnu Hadjar menyerang pasukan Belanda, anak buahnya pun dengan sigap membantu beliau. Berkat perlawanan yang dilakukan Ibnu Hadjar dan anak buahnya, mereka berhasil mengantisipasi pergerakan Belanda yang ingin melakukan penyerangan ke Desa Ni’ih. Banyak sekali kata ayah saya

---

64 Syamsul Bahri merupakan anak dari H. Tamberin yang merupakan mantan anak buah Ibnu Hadjar.

perjuangan yang dilakukan Ibnu Hadjar saat melawan penjajah Belanda dulu, sampai-sampai Ibnu Hadjar dicap sebagai tokoh yang sangat berbahaya pada saat itu.” (Wawancara Syamsul Bahri, 42 tahun, 22 Juli 2014, dalam Setiawan, 2014: 96–97).

Sepanjang perjuangan untuk kemerdekaan nasional antara tahun 1949 hingga 1950, wilayah Hulu Sungai di Kalimantan Selatan merupakan benteng perlawanan anti-Belanda. Oleh karena itu, pasukan Ibnu Hadjar—sebagaimana pasukan Abdul Kahar Mudzakar—sebagian besar terdiri dari bekas pejuang gerilyawan yang menjadi kecewa terhadap cara mereka diperlakukan sesudah tahun 1949 (Dijk, 1981: 218).

Semangat nasionalisme, patriotisme, dan gerakan cinta tanah air, memotivasi dirinya untuk berjuang bersama-sama dengan Hasan Basry melalui wadah perjuangan yaitu ALRI Divisi IV. Perjuangan tersebut merupakan dedikasi dirinya untuk mengintegrasikan Kalimantan Selatan dan bagian tenggara Kalimantan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Aizid, 2013 dalam Irwandi, 2019: 22). Ibnu Hajdar merupakan salah seorang pasukan tempur bersama Martinus, H. Damanhuri, Daeng Lajida, Pambalah Batung, Bung Hasan, dan Abdurrahman. Pasukan ini bernama Markas Besar RX-8 Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK) yang merupakan nama samaran ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Yang menjadi pimpinan umum Hassan Basry (Seman, 2004: 14–15; Kodam X, 1982: 190). Pasukan ini memainkan peranan penting dalam peristiwa Proklamasi 17 Mei 1949.



Gambar 16 Peta Wilayah ALRI Divisi IV  
(Sumber: Hassan Basry, *Kisah Gerilya Kalimantan*, 1961: 94)

Kesepakatan para pejuang untuk membentuk suatu panitia pemerintahan tentara yang akan dipimpin oleh seorang gubernur tentara dimulai dengan mengadakan rapat-rapat rahasia. Rapat rahasia pertama di Durian Rabung, Padang Batung, 7 Mei 1949 yang dipimpin oleh Gusti Aman. Rapat selanjutnya di rumah H. Abdul Kadir di Durian Rabung, 9 Mei 1949 yang dipimpin oleh H. Aberani Sulaiman dan dihadiri oleh Gusti Aman, Hasnan Basuki, Budhigawis, H. Damanhuri, Daeng Lajida, R. Sukadani, Setia Budi, dan Daeng Gidul Tololio. Keputusan rapat membentuk lembaga pemerintahan seorang gubernur dan memilih Hassan Basry selaku gubernur tentara sebagai kepala pemerintahan. Pertemuan itu segera dibubarkan karena ada informasi tidak aman. H. Aberani Sulaiman memerintahkan Ibnu Hadjar dan Setia Budi untuk bersiaga mengamankan daerah Padang Batung. Dini hari menjelang pergantian tanggal 15 ke 16 Mei 1949 di rumah Dumam, anak kampung Limau Gampang, Telaga Langsat (pada saat itu lokasi ini menggunakan nama samaran pedalaman Ambarawa), H. Aberani Sulaiman selaku pimpinan bersama-sama Gusti Aman, Hasnan Basuki, P. Arya, Budhigawis, Romansie menyusun naskah proklamasi dan dikawal ketika itu oleh pasukan Ibnu Hadjar. Teks proklamasi ditandatangani oleh Hassan Basry di hadapan Gusti Aman, Hasnan Basuki, P. Arya, Tobelo, Kardi, dan Haji Ramli. Teks proklamasi dibacakan oleh Hassan Basry selaku inspektur upacara pada tanggal 17 Mei 1949 di Mandapai (Semam, 2014: 56–57; Semam, 1972: 80; Kodam X, 1982: 205).

## Balai Pelestarian



Gambar 17 Monumen Proklamasi 17 Mei 1949 di Mandapai, Hulu Sungai Selatan. (Sumber: Koleksi Tim Peneliti)

Pertempuran antara pasukan Ibnu Hadjar dan tentara KNIL terjadi pada 24 Agustus 1949. Menjelang senja, Ibnu Hadjar berada di depan pagar kawat berduri depan tangsi KNIL Kandang, seraya berseru agar pihak KNIL menyerah. Tidak lama setelah itu pada tiang bendera yang ada dalam tangsi perlahan merayap naik bendera Merah Putih, berkibaran mengipas cakrawala senja (Djarani EM, 2001: 200 dalam Zamzam, 2015: 47).

Pada 1 November 1949, ALRI Divisi IV bergabung dalam Kesatuan Angkatan Darat Divisi Lambung Mangkurat dengan Letnan Kolonel Hassan Basry sebagai Panglimanya. Reorganisasi ALRI Divisi IV tersebut berdasarkan Surat Piagam Nomor 518/49 tanggal 2 November 1949, merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pelantikan dilaksanakan pada 10 November 1949 di Kandang oleh Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala dan membacakan amanat tertulis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Kepala Staf Divisi Lambung Mangkurat adalah H. Aberani Sulaiman dan terdiri dari empat kompi yang mewakili brigadennya masing-masing, yaitu:

1. Brigade I dengan Komandan Kapten Mulyono;
2. Brigade II dengan Komandan Letnan Ibnu Hadjar;
3. Brigade III dengan Komandan Kapten Martinus;
4. Brigade Pelajar dengan Komandan (sementara) Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala (Seman, 2014: 68–69).

Brigade Pelajar ini merupakan tempat untuk mempersatukan seluruh organisasi perjuangan pelajar yang terpisah-pisah. Untuk penyempurnaan organisasi oleh Delegasi Militer RI telah didatangkan seorang perwira dari Tentara-Pelajar (TP) di Yogya, yaitu Letnan II Sutomo (Gafuri, 1984: 112). Ibnu Hadjar dan Ma'rufi Utir menjadi pimpinan Pasukan Inti Tengah dalam Resimen II Tengah (Kodam X, 1982: 210).

Penggabungan ALRI Divisi IV ke dalam Divisi Lambung Mangkurat menimbulkan konflik internal. Pada 14 Januari 1950, Letnan H. Damanhuri ditangkap karena dituduh memeras barang dan uang dari rakyat untuk membangun dan membina tentaranya sendiri di Barabai. Pada hari yang sama seorang tokoh yang lebih penting, Achmad Zakaria, bekas komandan ALRI Divisi IV ditangkap dengan

tuduhan melakukan provokasi melalui khotbah di masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan Islam serta mengajak bekas gerilyawan memberontak. Keributan juga terjadi di daerah Birayang, sebelah utara Barabai; tiga ratus orang ditangkap oleh Divisi Lambung Mangkurat. Mereka dinyatakan berusaha menyusupi tentara dengan unsur-unsur pemberontak dan mengadakan kursus latihan militer di desa-desa. Baik Hassan Basry maupun Sukanda Bratamenggala menyatakan bahwa pertanyaan tentang kegiatan Divisi Tengkorak Putih hanya bagian kecil divisi yang terus berjuang. Dalam kegiatannya, mereka meyakinkan, tidak menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan ketertiban daerah. Divisi Tengkorak Putih “dalam kenyataannya” terintegrasi dalam tentara (Dijk, 1981: 240–241; Iqbal, 2018: 108).

Pasukan Tengkorak Putih juga mempunyai andil dalam menangkap dan menahan mata-mata musuh. Tidak semua tahanan adalah hasil tangkapan anggota kelompok gerilya ini, tetapi juga hasil tangkapan anggota ALRI Divisi IV. Seorang anggota pasukan Tengkorak Putih bernama Amis A., yang saat itu masih menjadi anggota ALRI pernah menyerahkan dua orang mata-mata Belanda untuk ditahan di Sungai Kudung. Begitu pula seorang anggota ALRI bernama Ibnu Hadjar (Haderi) pernah menyerahkan satu orang mata-mata Belanda langsung kepada Alimin, salah seorang anggota Pasukan Tengkorak Putih di Sungai Kudung (Wajidi, 2010: 54–55).

Pada 28 Januari 1950 Komandan Teritorium IV, yaitu Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala menerima bekas KNIL sebanyak satu kompi atau 100 orang infanteri pimpinan Letnan Satu Sualang dan satu kompi bantuan pimpinan Letnan Kotton. Sebagian anggota KNIL yang masuk dalam APRIS itu dijadikan pelatih dan komandan pasukan serta dinaikkan pangkatnya, sedangkan sebagian besar mantan pejuang gerilya yang masuk APRIS hanya berpangkat rendah dan prajurit biasa. Mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan seleksi (<https://bubuhanbanjar.wordpress.com/2012/01/14/ibnu-hadjar-dan-stigma-pemberontak/>, diakses 28 Oktober 2019, pukul 10.21). Ibnu Hadjar yang tidak memiliki kepandaian membaca aksara Latin terpaksa mendapatkan penurunan pangkat, begitu pula dengan ratusan orang lainnya (Irwandi, 2019: 46).

Hassan Basry berpendapat, “Sekali ini bukan lagi antara Indonesia melawan Belanda, tetapi antara yang kecewa dengan alat negaranya,



yang sesudah penyerahan kedaulatan beranggotakan kebanyakannya dari bekas KNIL dan kaki tangan Belanda.” (Basry, 2003: 86 dalam Zamzam 2015: 47). Pendapat yang sama terungkap dalam pengakuan Djohan Effendi dalam biografinya berikut ini.

“Djohan masih ingat ada orang-orang tua yang berkata, setelah dijajah Belanda Kalimantan dijajah Jawa. Sejak awal 1950-an para mantan prajurit Divisi IV ALRI yang masih berdinasi di militer menerima tunjangan yang jauh berbeda dengan rekan-rekan mereka di Jawa; sementara yang terkena demobilisasi tidak diakui sebagai veteran dan tidak menerima uang pensiun. Pemberontakan Letnan Dua Ibnu Hajar lahir sebagai akumulasi kekecewaan dan perasaan tertipu oleh pemerintah pusat. Melalui organisasi gerilya KRJT, Ibnu Hajar mengakomodasi para mantan prajurit yang merasa dikhianati. Ia lalu memimpin perlawanan di sekitar Kandangan. Aksi perlawanan mereka terhadap pemerintah pusat diikat oleh semangat Islam, karena Islam sangat instrumental dalam menyatukan sentimen rakyat Banjar. Ide negara Islam memang kerap dibicarakan di langgar-langgar (mushala) tempat Ibnu Hajar menumbuhkan moral para gerilyawan; namun dokumen yang menunjukkan adanya gambaran konkret dari ide negara Islam versi Ibnu Hajar sesungguhnya tidak pernah ada. Hubungan gerakan Ibnu Hajar dengan gerakan DI di Jawa Barat menjadi relevan setelah sejumlah tuntutan Ibnu Hajar sebagai syarat untuk berdamai tidak diindahkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, gagasan negara Islam yang disusupkan oleh pasukan DI mengkristal dengan mudah dalam gerakan Ibnu Hajar.” (Gaus AF, 2009: 20–21).

Tuduhan pemerintah pusat saat itu mengenai gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan juga dibantah oleh koran *Indonesia Merdeka* berjudul “Tak ada sangkut pautnya dgn. Kahar Muzakkar”.

“Mengenai berita mendaratnja 41 orang jg dapat dibekuk batang lehernja di Kalimantan Tenggara jaitu sebagaimana kita kabarkan hari Sabtu tadi, berita mana kita dapat dari fihak resmi djuga, selandjutnja untuk mengetahui duduk perkara jg sebenarnja, pagi tadi kita memerlukan datang pada Komisaris Muda Mahmud. Dalam suatu keterangannja, Komisaris Muda Mahmud terangkan, bahwa ke 41 orang itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Kahar Muzakkar. Hanja mereka benar bersalah, jaitu sebagai anggota “Lasjkar Rakjat Murba Dipisi Tengkorak Putih”, karena padanja terdapat tanda anggota dan tanda pembajaran sebagai anggota sebanjak R.10- seorang. Ditanja, dari suku apakah ke 41 orang itu. Komisaris Muda Mahmud terangkan pula, hal ini masih belum diketahui dengan terang, hanja dapat diketahui bahwa kepala dari Tengkorak Putih Kalimantan Tenggara, ialah nama Kasran, berasal dari Hulu Sungai.” (*Indonesia Merdeka*, Selasa, 23 Oktober 1951).

Peneliti melakukan wawancara terhadap satu-satunya mantan anak buah Ibnu Hadjar dan juga mantan anggota Kesatuan Rakjat jang

Tertindas (KRjT) di Telaga Silisili bernama Badri (85 tahun)<sup>65</sup>. Berikut ini ringkasannya.

"Nama saya Badri, dahulu pada zaman gerombolan itu kejam, bila salah sedikit dibunuh oleh tentara Ibnu Hadjar. Bila dapat laporan dari pasukannya orang yang membuat kesalahan langsung dibunuhnya tanpa ada pernyataan dulu. Ibnu Hadjar mengaku raja pada saat itu karena tentaranya banyak. Ada siaran pemerintah untuk menangkap Ibnu Hadjar, diberikan upah. Lalu kami keluar dari gerombolan Ibnu Hadjar dan menyerah ke pemerintah, tinggal Ibnu Hadjar sendiri. Setelah banyak yang keluar dari gerombolan Ibnu Hadjar, semua dikirim ke Banjar. Setelah itu, Ibnu Hadjar tidak mau keluar dan bersembunyi di dalam persembunyiannya saja. Pada saat di gerombolan Ibnu Hadjar kami berjaga satu jam bergantian sebanyak 500 orang."

Badri mengenal Ibnu Hadjar pada zaman revolusi dan bergabung menjadi anak buahnya pada usia 16 tahun karena janji yang baik-baik dari Ibnu Hadjar. Dia menceritakan mengapa Ibnu Hadjar menjadi pemberontak.

"Karena mau jadi Raja se-Kalimantan, asalnya pemerintah kejam, bila salah sedikit ditembak, jadi rakyatnya bingung, ada separuh mengikuti Ibnu Hadjar dan ada yang separuh mengikuti pemerintah, lalu pemerintah sambil mencari Ibnu Hadjar menanyakan kepada rakyat, kalau tidak tahu langsung ditampar oleh tentara. Kenapa Ibnu Hadjar setelah melawan Belanda lalu memberontak terhadap pemerintah karena merasa rendah pangkatnya, tidak naik naik dan kecewa terhadap pemerintah karena pemerintah menganggap Ibnu Hadjar belum sekolah dan tidak punya pangkat tinggi."

Badri juga menceritakan jasa Ibnu Hadjar saat melawan Belanda dan kesaktian yang dimiliki oleh Ibnu Hadjar

"Ibnu Hadjar ikut menggempur Belanda dipimpin oleh Hassan Basry. Pada masa itu berjanji, bersumpah, sakit sama sakit, nyaman sama nyaman, siapa melanggar dikutuk Al-Qur'an 30 juz dan aku ikut bersumpah juga. Aku dulu sering dipukul dan ditangkap Belanda dan dihukum sehabian dijemur di atas aspal di Telaga Langsat. Setelah itu, baru dikembalikan lagi kami. Belanda sangat kejam pada masa itu. Salah satu kesaktian Ibnu Hadjar kebal ditembak."

Kekecewaan Ibnu Hadjar ternyata telah terjadi sejak awal Indonesia merdeka. Berikut wawancara peneliti dengan salah seorang cucu Ibnu Hadjar bernama Surya dari anak Ibnu Hadjar yang bernama Raf'i.

"Untuk daerah Kassel kata Soekarno merdekakan Kandangan, kemudian kata Hassan Basry serang Belanda yang ada di Banjarmasin. Terus bila sudah

65 Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Rizani yang telah membantu proses wawancara dalam bahasa Banjar dan Muhammad Fadil yang menerjemahkan hasil wawancara berbahasa Banjar.

merdeka dijadikan gubernur oleh Soekarno. Setelah merdeka ternyata orang lain yang jadi bupati. Sebenarnya salah persepsi, seharusnya melawan Belanda, karena kecewa janji pemerintah yang mengentengkan janjinya, berarti pengkhianat, lalu memutarbalikkan fakta. Tapi tidak apa-apa karena sudah nasib, sempat ditawarkan Bupati Ibnu Hadjar kalau berhasil melawan Belanda dan kalau Hassan Basry menjadi Gubernur Kalsel.”

Surya juga menceritakan tentang saudara sekandung Ibnu Hadjar.

“Haderi, Dardi, dan Kadri adalah bersaudara. Husen anak Dardi. Nama asli Ibnu Hadjar adalah Haderi bin Umar, Ibnu Hadjar kakak paling tua. Kadri hidup lama di Jakarta dan sudah punya anak satu.”

Akibat dari aksi yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar, namanya menjadi pemberitaan berbagai media baik di dalam maupun luar negeri. Radio *Algemeen Nederlands Persbureau* (ANP) menyiarkan tentang penyerahan diri Ibnu Hadjar bersama 5.200 pengikutnya.



Gambar 18 Buletin Radio ANP, 12 Oktober 1956

(Sumber: <https://www.delpher.nl/nl/radiobulletins/results?query=ibnu+hadjar&coll=anp>, akses tanggal 22/11/2019, pukul 06.22)

Berikut ini terjemahan buletin Radio ANP, 12 Oktober 1956:

Red.	Tanggal	Pukul	Subjek
Vliet	12.10.56	20	Pemimpin geng Indonesia Menyerah

Di Borneo, pemimpin geng Ibnu Hadjar menyerah kepada tentara Indonesia dengan 5.200 pengikut. Hadjar adalah pemimpin “Front

Rakyat Tertindas”. Pemimpin geng telah berjanji untuk setia kepada pemerintah Indonesia. Ini terjadi di sebuah desa kecil dekat Bandjermasin, di depan komandan militer Kalimantan, Letnan Kolonel Basri.

Pemerintahan saat itu tetap saja mengaitkan pasukan KRJT dengan DI/TII agar mudah menekan Ibnu Hadjar dan akhirnya beliau menyerah pada bulan Juli 1963, setelah berjuang selama 13 tahun melawan pemerintah pusat.



Gambar 19. Gua Mandala, tempat persembunyian pasukan KRJT selama bergerilya.  
(Sumber: Koleksi Tim Peneliti)

Saat menyerah pun, Ibnu Hadjar masih menawarkan dirinya untuk ikut dalam konfrontasi dengan Malaysia.

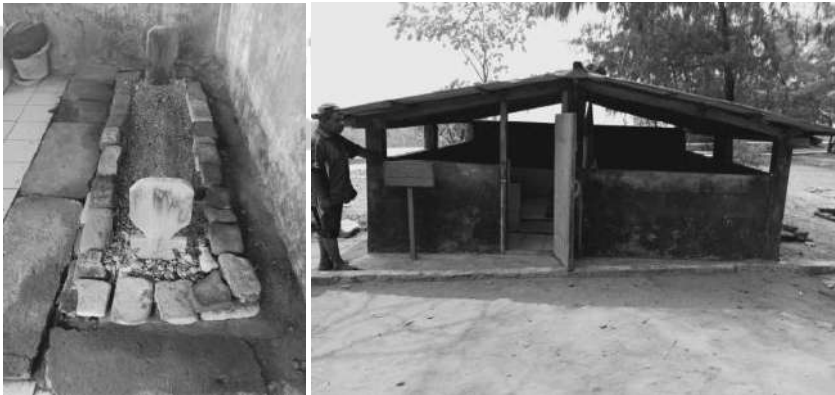
“Sekali lagi, Ibnu Hajar memberi isyarat bahwa gerakannya selama ini sejatinya bukanlah dorongan untuk mendirikan negara Islam. Beberapa saat setelah penyerahan diri, di hadapan pers ia menyatakan bahwa jika negara membutuhkannya maka ia bersedia mengabdikan kepada Republik; dan ia beserta 14 ribu pengikutnya juga bersedia dilibatkan dalam konfrontasi dengan Malaysia (yang saat itu sedang disuarakan oleh Presiden Soekarno). Pernyataan semacam itu tidak akan keluar dari seorang separatis, tetapi dari orang yang sangat mencintai negerinya.” (Gaus AF, 2009: 21).

Setelah ditangkap di Desa Ambutun, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ibnu Hadjar dibawa ke Bandara Landasan Ulin (Saat ini Syamsudin Noor) Banjarbaru untuk diterbangkan ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, beliau menghadapi sidang Mahkamah Militer dan dijatuhi hukuman mati pada 23 Maret 1965.



Gambar 20 Ibnu Hadjar diadili dan dijatuhi hukuman mati.  
(Sumber: Buku *30 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*)

Kemudian Ibnu Hadjar dieksekusi di salah satu Pulau di Kepulauan Seribu dan diduga dimakamkan di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, Jakarta.



Gambar 21 Makam yang diduga kuburan Ibnu Hadjar di Pulau Onrust  
(Sumber: Koleksi Tim Peneliti)

## B. PEMIKIRAN IBNU HADJAR

Mencermati perjalanan hidup Ibnu Hadjar, dapat disimpulkan bahwa beliau adalah orang biasa yang memiliki rasa cinta tanah air, rela berkorban nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Semangat nasionalisme, patriotisme, dan gerakan cinta tanah air, memotivasi dirinya untuk berjuang bersama-sama dengan Hasan Basry melalui wadah perjuangan yaitu ALRI Divisi IV. Perjuangan tersebut merupakan dedikasi dirinya untuk mengintegrasikan Kalimantan Selatan dan bagian tenggara Kalimantan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Aizid, 2013 dalam Irwandi, 2019: 22).

Perlawanan terjadi ketika beliau menuntut keadilan terhadap pemerintah pusat akibat dari proses rasionalisasi dan seleksi administrasi di dalam tubuh kemiliteran, yang tidak sesuai dengan harapan para pejuang. Pemerintah Orde Lama memiliki alasan rasionalisasi administrasi terhadap pejuang lokal yang masih buta huruf aksara Latin. Sebenarnya mereka bisa membaca namun hanya huruf Arab dan huruf Arab Melayu. Oleh karena itu, beliau mengakomodasi kekecewaan para pejuang dalam wadah Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT).

Kita menilai Ibnu Hadjar dari sisi dirinya saat bertabrakan ideologi dengan pemerintah pusat. Ia telah melihat, merasakan, menilai, kemudian bersikap terhadap persoalan yang dihadapi olehnya dan pengikutnya. Dilihat dari sudut hubungan pusat dan daerah pada masa itu, tampak semakin meluasnya penguasaan pusat ke daerah. Ketika Kalimantan Selatan menyatakan dirinya sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Indonesia, maka kepentingan-kepentingan penduduk yang telah melaksanakan dan merasakan pahit getirnya perjuangan sebelumnya dikorbankan untuk Negara Kesatuan ini. Hal ini perlu dikemukakan untuk membantu memperjelas pemahaman terhadap Ibnu Hadjar, bahwa gerakannya tidak selalu dilihat dari kacamata pusat, tetapi lokal agar dapat memahami revolusi nasional dengan lebih baik (Anis, 2011: 63–64).

Hubungan Ibnu Hadjar dengan Hassan Basry merupakan hubungan *papadaan* (wawancara Hariyadi, 6 Agustus 2019). Konsep dalam bahasa Banjar ini memiliki arti kawan dekat, kawan yang sering bertemu, atau masih ada hubungan keluarga. *Papadaan* dirasakan berorientasi pada sifat “damai”. Ada nilai-nilai solidaritas yang sangat

luas di sana (<https://papadaanku.wordpress.com/2010/01/24/apa-itu-papadaan/>, diakses 15 November 2019, pukul 16.03). Oleh karena itu, pemerintah pusat menyadari bahwa tidak mungkin memadamkan gerakan Ibnu Hadjar melalui tangan Hassan Basry. Akhirnya Hassan Basry diberi beasiswa dan dikirim ke Universitas Al-Azhar Mesir dan digantikan oleh Sukanda Bratamenggala.

Menarik untuk ditampilkan pandangan dua orang sejarawan senior tentang Ibnu Hadjar untuk menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Asvi Warman Adam berpendapat bahwa manuver ketentaraan Ibnu Hadjar tetap dianggap pemberontakan meskipun ia pernah berjuang sebelumnya melawan penjajah atau tidak puas dengan kebijakan pemerintah mengenai tentara (Adam, 2019: 4). Adapun Anhar Gonggong berpendapat gerakan seperti Ibnu Hadjar mempertanyakan bahwa setelah merdeka mengapa yang dipikirkan hanya Jawa, bukan untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Anhar Gonggong membandingkan antara gerakan yang dilakukan oleh Kahar Mudzakkar dan Ibnu Hadjar yang memiliki kemiripan penyebabnya. “Gerakan Kahar Mudzakkar awalnya bukan gerakan DI/TII, justru untuk menegakkan Pancasila dengan membentuk Resimen Hasanuddin. Begitu pula dengan Ibnu Hadjar, berkaitan dengan rakyat yang merasa tertindas, walaupun ada Islamnya, tetapi dia tidak terlalu menonjolkan diri sebagai gerakan Darul Islam dan lebih pada gerakan rakyat tertindas. Ketertindasan yang dirasakan oleh Ibnu Hadjar itu karena tidak ada yang berubah setelah dia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Secara umum memang melemahkan persatuan bangsa, tetapi kalau ditelusuri lebih dalam, sebenarnya tidak ada yang bertujuan seperti itu, awalnya karena kekecewaan” (Wawancara tanggal 27 November 2019).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anis, M.Z. Arifin. 2011. "Ibnu Hajar: Patriot Tertindas", dalam *Jurnal Kebudayaan KANDIL*, Edisi 20, Tahun VIII, Januari–Maret 2011.
- Basry, H. Hassan. 1961. *Kisah Gerilya Kalimantan (dalam Revolusi Indonesia) 1945–1949*. Banjarmasin: Jajasan Lektur Lambung Mangkurat.
- Dijk, C. van. 1981. *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*. Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff.
- Gafuri, H. Ahmad. 1984. *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945–1949)*. Tanjung: Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Tabalong.
- Gaus A.F., Ahmad. 2009. *Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi*. Jakarta: ICRP & Penerbit Kompas.
- Iqbal, Muhammad. 2018. "Pemberontakan KRjT di Kalimantan Selatan (1950–1963) (Sebuah Kajian Historis)", dalam *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 16 (1), 2018.
- Irwandi, Febri. 2019. *Suplemen Bahan Ajar: Biografi Ibnu Hadjar*. Malang: Madza Media.
- Kodam X/Lambung Mangkurat. 1982. *Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Menegakkan Kemerdekaan R.I. 1945–1949*, 1 November 1982.
- 
- Pusat Sejarah & Tradisi ABRI. 1990. *30 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*. Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Seman, M. Sanit. 1972. *Sejarah Politik Pendudukan Belanda dan Perlawanan Rakyat di Kalimantan Selatan (antara 1945–1949)*, Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Seman, H.M. Syamsiar. 2004. *Lahirnya ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan*. Banjarmasin: Lembaga Studi Sejarah Perjuangan dan Kepahlawanan Kalimantan Selatan.
- Setiawan, Adi. 2014. *Persepsi Masyarakat Desa Kalinduku, Kandangan terhadap Tokoh Ibnu Hadjar Tahun 2012*, Skripsi Prodi Pendidikan Sejarah, Jurusan IPS, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.



Wajidi. 2010. *Gerakan Tengkorak Putih Sebuah Kelompok Gerilya di Kalimantan Selatan 1949–1950*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Zamzam, Fakhry. 2015. *Zafry Zamzam Waja Hampai Kaputing*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).

### **Surat kabar**

*Indonesia Merdeka*, Selasa, 23 Oktober 1951

### **Laman**

<https://bubuhanbanjar.wordpress.com/2012/01/14/ibnu-hadjar-dan-stigma-pemberontak/>, diakses tanggal 28 Oktober 2019 pukul 10.21.

<https://papadaanku.wordpress.com/2010/01/24/apa-itu-papadaan/>, diakses tanggal 15 November 2019 pukul 16.03

### **Makalah**

Adam, Asvi Warman. “Peran Sejarawan Publik untuk Kestinambungan Republik”, Makalah Seminar Sejarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Sejarah 2019 “Membayangkan Indonesia di Hari Depan”, Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Centre Jakarta, 4–6 Desember 2019.

### **Informan**

---

1. Badri (85 tahun), mantan anggota Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT);
2. Surya, cucu Ibnu Hadjar;
3. Hairiyadi, dosen Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat;
4. Anhar Gonggong, sejarawan senior.

# Penutup

---

Pada awalnya, kumpulan tulisan hasil penelitian ini berjudul: *Pemikiran Para Tokoh dalam Mewujudkan Persatuan Bangsa di Kalimantan Selatan pada Masa Pergerakan Kemerdekaan (1945–1970)*. Namun, beberapa kendala dialami setelah di lapangan. Pada seminar pada tanggal 2–5 November 2019, judul mengalami perubahan sesuai arahan dari narasumber dan masukan yang diperoleh selama diskusi. Jadilah buku di hadapan pembaca ini berjudul: *Penguatan dan Pelemahan Persatuan Bangsa: Media dan Tokoh di Kalimantan Selatan (1923–1959)*.

Buku ini dikerjakan oleh tiga orang peneliti dengan jabaran dan simpulan masing-masing yang sudah diberikan dalam tulisan. Sebagai penutup, tim penulis dapat membuat ikhtisar dari ketiga tulisan dalam bab-bab sebelumnya sebagai berikut.

1. Pangeran Mohamad Noor merupakan tokoh yang pantas menjadi panutan. Semangat belajarnya tinggi dan mampu menyelesaikan kuliah dengan baik sebagai insinyur pada tahun 1927 pada masa kolonial Belanda. Ilmu yang diperolehnya mengantarkan dirinya untuk bekerja di bidang pengairan dan pekerjaan umum. Kesempatan yang baik baginya untuk mengabdikan bagi negara dan daerahnya Kalimantan Selatan. Beliau merupakan gubernur pertama Kalimantan dan sebagai Gubernur Perjuangan yang sebelumnya aktif sebagai anggota BPUPKI. Pemikirannya sungguh hebat, karena beliau berhasil merancang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Riam Kanan, dan melakukan pengerukan Sungai Barito. Semua ini dilakukan untuk kepentingan rakyat banyak. Semasa menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, beliau juga aktif untuk memikirkan pembangunan dalam usaha pembentukan otonom Kalimantan Tengah. Sebagai seorang pejuang dalam pergerakan kemerdekaan, P.M. Noor berhasil membangun persatuan dan kesatuan karena pasukan yang dibangunnya berasal dari semua wilayah

Kalimantan sehingga beragam etnis dan agama bisa berkumpul dalam satu wadah perjuangan Pasukan MN 1001 dan ia berhasil membangun kebangsaan pada masa revolusi. Beliau juga pemikir yang menuangkan ide pemikirannya dalam *Mimbar Indonesia* di Jakarta, majalah yang mempunyai visi kebangsaan dan kesatuan bangsa. Dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ia berperan dengan menolak bentuk negara federal buatan Belanda. Sebenarnya, ada beberapa julukan yang layak diberikan kepada P.M. Noor, seperti Abah Pembangunan, Gubernur Borneo Pertama, Gubernur Perjuangan, Teknokrat Birokrat, dan Pahlawan Nasional.

2. *Media Soeara Pakat* edisi tahun 1940-an terbitan Banjarmasin berisikan harapan besar untuk mempersatukan berbagai kelompok etnik penduduk Kalimantan yang tidak mengidentifikasi diri sebagai Melayu (termasuk Banjar yang mulanya kerap ditempel oleh identitas Melayu menjadi Melayu-Banjar) dalam sebuah identitas bersama, Dayak. Proses konstruksi tersebut berlangsung bersamaan dengan berkembangnya gagasan ke-Indonesia-an. Gagasan ke-Indonesia-an dipadukan dengan gagasan persatuan Dayak oleh segelintir anggota Pakat Dayak sehingga menghasilkan konsep Indonesia-Dayak (*Indonesier-Dayak*). Gagasan persatuan Dayak disampaikan secara lugas dalam porsi jauh lebih besar dibanding dengan gagasan Indonesia-Dayak. Gagasan kedua muncul secara tersirat atau lebih tepatnya disisipkan oleh penulis dalam artikel yang sebenarnya mengangkat gagasan utama lain. Kenyataan yang tidak mengherankan (atau dalam konteks berorganisasi bahkan sudah seharusnya) mengingat *Soeara Pakat* adalah media propaganda Pakat Dayak yang bertujuan membangun persatuan Dayak.
3. Ibnu Hadjar seorang pemberani dan pernah berjuang bersama Hassan Basry dalam perjuangan ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan. Ibnu Hadjar, dari sisi dirinya, bertabrakan ideologi dengan pemerintah pusat. Ia telah melihat, merasakan, menilai, kemudian bersikap terhadap persoalan yang dihadapi bersama pengikutnya. Dilihat dari sudut hubungan pusat dan daerah pada masa itu, tampak semakin meluasnya penguasaan pusat ke daerah. Ketika Kalimantan Selatan menyatakan dirinya sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Indonesia maka kepentingan-kepentingan

penduduk yang telah melaksanakan dan merasakan pahit getirnya perjuangan sebelumnya dikorbankan untuk Negara Kesatuan ini. Hal ini perlu dikemukakan untuk membantu memperjelas pemahaman terhadap Ibnu Hadjar bahwa gerakannya tidak selalu dilihat dari kacamata pusat, tetapi juga dari pandangan lokal agar dapat memahami revolusi nasional dengan lebih baik.



---

## **Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat**



---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

## Tentang Penulis



**JUNIAR PURBA** (niar.gambir@yahoo.com) adalah salah seorang tenaga fungsional di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan. Menamatkan S-1 ilmu Sejarah dari Universitas Sumatera Utara (USU, 1988) dan S-2 pada Jurusan Sosiologi Universitas Tanjungpura (2008) dengan tesis berjudul “Fungsi dan Makna Simbol dalam Tradisi Imlek dan Cap Go Meh pada Masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak”. Melakukan sejumlah penelitian kesejarahan dan budaya di wilayah Kalimantan; aktif dalam kegiatan ilmiah. Pada tahun 1999/2000 aktif di Badan Pembina Pahlawan Daerah (BP2D) wilayah Kalimantan Barat. Tulisan yang dihasilkan antara lain Biografi Rahadi Osman, Bardan Nadi, J.C. Oevang Oeray, Oemar Dachlan, Pang Suma, Alianyang, Awang Long, Kota Pangkalan Bun, dan Orang Kantuk di Bika (2006), Sejarah Penyebaran dan Pengaruh Budaya Melayu di Kalimantan (2011), Adat dan Tradisi Masyarakat Suku Dayak Kayan di Miau Baru, Kaltim (2012), Pelabuhan Silo di Berau (2015), Elite dalam Struktur Politik di Berau (2014), Sejarah dan Pengaruh Islam di Kotawaringin (2014) Masyarakat Bugis Diaspora di Bontang (2015), Pelabuhan Tanjung Laut di Bontang (2017), Integrasi Sosial Transmigran Bali di Desa Kertabuana (2018), dan beberapa tulisan lainnya. Tahun 2008–2012 bekerja sebagai tenaga pengajar di Program Studi Sejarah, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Pontianak. Adapun tahun 2016 bekerja sebagai tenaga pengajar di Universitas Tanjungpura dan aktif sebagai narasumber dan juri lomba di Dinas Arsip Kota Pontianak, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

**DANA LISTIANA** (dana.listiana@gmail.com), lulus dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran tahun 2006 dengan skripsi “Perkembangan Pasar Pontianak sebagai Pusat Perekonomian *Afdeelingshoofdplaats* Pontianak 1918-1942”. Lulus dari Program Studi S-2 Sejarah Universitas Gadjah Mada pada 2017 dengan tesis “Sistem Pacht dan Perluasan Negara Kolonial di Pontianak 1819–1909”. Sejak tahun 2008 bekerja di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat (dulu, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak). Kajian yang pernah ditulis antara lain “Kota Pontianak 1779–1942: Lahir dan Berkembangnya Sebuah Kota Kolonial” (2009); “Dua Wajah Kota Martapura: Studi tentang Perubahan Sosial Ekonomi” (2010); “Banjarmasin Akhir Abad XIX hingga Medio Abad XX: Perekonomian di Kota Dagang Kolonial” (2011); “Tanah Sintang Masa Kolonial: Telaah Sederhana tentang Perubahan Status Pemerintahan dan Wilayah Kekuasaan” (2012); “Pasir Abad XVIII–XX: Kota Bandar Menjadi Lanskap Gubernemen” (2013); “Kampung Cina Banjar di Banjarmasin” (2014); “Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial” (2014); dan “Rubrik Sinar Iboe di Majalah Tjaja Timoer: Gagasan Penguatan Perempuan dalam Pers Lokal di Kalimantan Barat Tahun 1928” (2017).

Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat



**YUSRI DARMADI** (yusri.darmadi@gmail.com) lahir di Dumai (Riau), 30 Juli 1981. Menempuh pendidikan S-1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Ilmu Sejarah. Pada tahun 2014 diterima sebagai Pengelola Data Nilai Budaya di Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak. Adapun penelitian ilmiah yang pernah dilakukan: “Sejarah Pelabuhan Silo di Teluk Bayur Berau (1912–1957)” (tim), “Diaspora Masyarakat Cina di Sampit Pada 1847–1942” (tim), “Nieuw Brussel’ di Kalimantan Barat: Peran strategis Sukadana pada Abad ke-19”, dan “Dari Hulu ke Hilir: Integrasi Ekonomi di Sungai Kapuas pada 1900–1942” (tim).



---

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat





---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

# Penguatan dan Pelemahan Persatuan Bangsa:

Media dan Tokoh di Kalimantan Selatan (1923-1959)

Pada tahun 1940-an, di Kalimantan Selatan tumbuh suatu gerakan pemuda Dayak. Gagasan dari para intelektual muda ini dikemukakan dalam bentuk publikasi atau propaganda dan menyoroti persatuan etnis Dayak. Diskusi tentang arah pergerakan Pakat Dayak yang fokus pada pergerakan di dalam kelompok dan membuka diri terhadap aktivitas-aktivitas pergerakan kebangsaan yang lebih luas ini menunjukkan keragaman pemikiran dalam organisasi. Hal ini dimuat pada *Soeara Pakat* edisi tahun 1940-an.

Impian persatuan bangsa dalam *Soeara Pakat* terbitan Banjarmasin tersebut menjadi salah satu bahasan menarik dalam buku *Penguatan dan Pelemahan Persatuan Bangsa: Media dan Tokoh di Kalimantan Selatan (1923-1959)* ini. Buku yang digagas para peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kalimantan Barat ini memang telah berhasil menghimpun dan mendokumentasikan pemikiran para pelopor kesatuan bangsa di Kalimantan Selatan.

Dua tulisan lain mengetengahkan dua sosok fenomenal: Ir. P.M. Noor dan Ibnu Hadjar. Ir. Pangeran Mohamad Noor merupakan salah seorang pemuda pertama dari Kalimantan Selatan yang saat itu berhasil meraih gelar insinyur teknik dari *Technische Hoogeschool te Bandoeng*. Pemikiran beliau sungguh berharga dalam memajukan bangsa, khususnya dalam bidang pembangunan. Adapun Ibnu Hadjar, meskipun dikenal sebagai tokoh yang mengakomodasikan kekecewaan para pejuang dalam wadah Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT), merupakan sosok yang keras, pemberani, sekaligus memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi.

KSE - 9



Padalarang-Bandung  
Telp. +62 812 22205182

Email: penerbit.mja.bandung@gmail.com



Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan

ISBN 978-623-7526-15-5



9 786237 526155